



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VI DENGAN BADAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN) DAN RAPAT DENGAR
PENDAPAT UMUM DENGAN KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN
MEIKARTA (KPKM)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	:
Jenis Rapat	: Rapat RDP dan RDPU
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 18 Januari 2023
Waktu	: 10.00 WIB s.d 12.44 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	: Mohamad Hekal, MBA. (F-PGerindra)/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Acara	: Pembahasan mengenai penyampaian aspirasi dari KPKM, Konsumen Meikarta terhadap Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT. Mahkota Sentosa Utama)
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI
Hadir	A. Anggota DPR RI: 37 dari 57 orang Anggota dengan rincian:

1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

11 dari 12 orang Anggota

1. Aria Bima
2. Adisatrya Suryo Sulisto
3. Prof. Assc.Dr. Darmadi Durianto, S.E.,
M.B.A.
4. Rieke Diah Pitaloka

5. St. Ananta Wahana, S.H.
6. Sonny T. Danaparamita, S.H.
7. Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
8. Dr. Evita Nursanty., M.Sc
9. Dr. H. Mufti A.N. Anam
10. DR. Ir. Harris Turino, S.H., M.Si., M.M
11. I Nyoman Parta, S.H.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

5 dari 8 orang Anggota

1. M. Sarmuji., S.E., M.Si
2. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.AP
3. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M
4. Doni Akbar, S.E
5. Nusron Wahid

**3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)**

4 dari 8 orang Anggota

1. Mohammad Hekal, M.B.A.
2. Andre Rosiade
3. Ir. H. La Tinro La Tunrung
4. M. Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M.,
MBA.

5. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)

4 dari 6 orang Anggota

1. H.P. Martin Y. Manurung, SE., MA.
2. Zuristy Firmadata, S.E., M.M.
3. Muhammad Rapsel Ali
4. H. Subardi, S.H., M.H

**6. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
(F-PKB)**

4 dari 7 orang Anggota

1. Faisol Riza
2. Ir. H.M. Nasim Khan
3. Siti Mukaromah, S.Ag., M.A.P
4. H. Ali Ahmad

7. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

2 dari 5 orang Anggota

1. Melani Leimena Suharli
2. Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono,
B.Coom., M.Sc.



8. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F-PKS)

2 dari 4 orang Anggota

1. Hj. Nevi Zuairina
2. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos

9. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

4 dari 5 orang Anggota

1. Dr. H. Jon Erizal, S.E., MBA.
2. Abdul Hakim Bafagih
3. Eko Hendro Purnomo, S.Sos
4. Daeng Muhammad, SE., M.Si.

10. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. Elly Rachmat Yasin

B. UNDANGAN

1. Ketua BPKN (Rizal E. Halim)
2. Wakil Ketua BPKN (M. Mufti Mubarak)
3. Sekretaris BPKN (Mulyeni)
4. Anggota BPKN (Said S)
5. Anggota BPKN (Andi M. Rusdi)
6. Anggota BPKN (Ermanto F)
7. Ketua KPKM (Aep Mulyana)
8. Wakil Ketua KPKM (Dhani A)
9. Sekretaris KPKM (Nurul Fatma)
10. Bendahara KPKM (Slamet Waluyo)
11. Anggota KPKM (Cessna)
12. Anggota KPKM (dr. Natasha, SpA)
13. dll...

JALANNYA RAPAT:

F-P.GERINDRA (MOHAMAD HEKAL, MBA / WAKIL KETUA) KETUA RAPAT:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI, dan

Selamat datang kami ucapkan kepada Saudara Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional Bapak Rizal Halim dan jajarannya, kedua



kepada Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Ir. Aep Mulyana beserta rombongannya.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah *Subhabahu Wa Ta'ala* pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat dengar pendapat umum Komisi VI dengan Badan Perlindungan Konsumen dan juga dengan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta semua *Insyallah* dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Bapak, Ibu yang kami muliakan,

Karena ini sifatnya RDPU sebetulnya tidak perlu kuorum tapi saya sampaikan di sini yang hadir baik *online* maupun fisik sudah ada 24 dan ini yang mewakili 8 Fraksi, sehingga rapat tetap memenuhi kuorum dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum.

Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)
(RAPAT DIBUKA pukul 10.49 WIB)**

Baik terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Kepala Badan Perlindungan Konsumen dan juga dengan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta untuk bisa menghadiri rapat pada hari ini. Kami menerima surat dari Komunitas Peduli Konsumen yang mengeluhkan mengenai persoalannya dan dengan perusahaan Meikarta kalau enggak salah PT Mahkota Sentosa Utama dan memang di minggu pertama ini kita agendakan untuk menerima audiensi-audiensi dari masyarakat yang punya keluhan. Nah tentunya dalam hal ini mereka adalah merupakan konsumen yang tentunya mengalami suatu masalah sehingga meminta waktu untuk hadir di Komisi VI DPR RI ini.

Dan kita minta dihadirkan Badan Perlindungan Konsumen juga untuk bisa ikut mendengarkan dan nanti mungkin sedikit memberi masukan juga, karena juga isunya kita mau tahu apa kalau misalnya ada hal-hal seperti ini yang bisa dilakukan oleh Badan Perlindungan Konsumen mengingat, mengingat Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga akan segera dibahas, sehingga kalau ada kurang-kurang yang rasanya kita perlu perkuat perlindungan konsumen ini bisa sekalian kita tangkaplah. Ini buat jadi contoh kasus semoga bermanfaat buat masyarakat, buat Pemerintah, dan kita semua.

Baik untuk ini, ini saya lihat ada presentasi yang telah disiapkan oleh Badan Perlindungan Konsumen ini. Mungkin sebelum BPKN kita mau dengar dulu dari yang membawa masalah, sehingga kami persilakan kepada Komunitas Peduli Konsumen Meikarta untuk memperkenalkan diri dan langsung menyampaikan keluhannya.

Silakan.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):



Baik terima kasih Bapak Pimpinan Bapak Mohamad Hekal.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua ya.

**Yang terhormat Bapak Pimpinan rapat,
Yang terhormat jajaran atau rekan-rekan atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu
Anggota Komisi VI ya DPR RI,
Yang terhormat rekan-rekan komunitas semuanya termasuk pengurus,
dan anggota-anggota komunitas ya,
Yang terhormat Bapak Ketua BPKN dan jajarannya Pak,**

Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan izinkan kami memperkenalkan diri bahwa kami itu dari perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Pak. Jadi kebetulan ketuanya saya sendiri dengan Aep Mulyana, yang sebelah kanan saya itu wakil ketua Pak Dani ya, kemudian sekretaris itu Bu Nurul, ada bidang hukumnya juga Pak, demikian. Jadi intinya kita *alhamdulillah* sudah legal ya berbadan hukum ya KemenhuHAM.

Untuk itu mungkin izinkan saya untuk langsung saja ke kronologis ya daripada mengapa kami ini mengirim surat ke wakil rakyat kami yaitu Komisi VI ya. Jadi awalnya kami ini semua anggota itu merupakan konsumen atau pembeli *unit* Apartemen Meikarta ya. Kemudian rata-rata kami ini dijanjikan untuk serah terima itu yaitu antara tahun 2018 sampai tahun 2020 Pak ya. Nah sampai saat ini *unit*-nya masih mangkrak Pak, bahkan sebagian besar masih berupa lapangan tanah merah ya? Terutama yang ada di *district* 2 dan 3, bahkan *district* 1 juga itu masih belum selesai ya seperti itu. Terus apa usaha kami yang bisa dilakukan pada saat itu? Ya jadi intinya konsumen Meikarta itu terdiri dari yang ada yang *cash* bertahap ya, artinya anggota kami itu langsung beli secara *cash* ya, keras itu sekitar tahun 2017-2018 ya. Nah ada juga yang melalui KPA yaitu diantaranya melalui Bank Nobu yang dalam hal ini masih termasuk groupnya Lippo ya, artinya masih termasuk groupnya Lippo, kemudian ada juga ke bank lain diantaranya CIMB Niaga, Muamalah, BNI, kemudian Cipta Dana ya

Jadi sejak gagal serah terima kami udah berupaya menyurati, ya memberikan surat, menyampaikan keluhan, itu pertama ke BPKN Pak ya itu ada tanda terimanya yaitu 13 Juli 2022 Pak tapi mungkin karena kesibukan atau memang banyak masalah di BPKN atau mungkin seperti apa sehingga belum ada tanggapan sampai saat ini.

Terus sejak gagalnya serah terima secara per orangan pun kami itu terus secara persuasif itu mendatangi pihak Meikartanya sendiri ya di sana tapi dihadapkan tetap sama salesnya, kebetulan manajemennya tidak mau untuk turun ya dan dengan kata-kata satu bahwa kami komitmen akan meneruskan pembangunan seperti itu terus jadi tetap tidak ada kepastian penyelesaian *unit*-nya.



Karena jawaban pengembang seperti itu sehingga kami membentuk komunitas dengan saat ini ya saat ini itu anggota kami itu sekitar 130 orang lebih yang tiap harinya itu banyak yang mau gabung sebetulnya ya kan, dari konsumen-konsumen yang merasa senasib sepenanggungan dengan kami, artinya banyak yang belum diserahterimakan juga di luar sini tapi tujuan kami bukan untuk mencari ketenaran, dalam artian bahwa kami ya walaupun 130 asal kita bisa mufakat dengan apa dengan pihak Meikarta dan nilai *value*, apa nilainya kan tidak besar juga sebetulnya ya sudah tadinya seperti itu. Ya tapi setelah kami berupaya untuk menanyakan status *unit* kami ya tidak ada mungkin tanggapan ya tetap saja bahwa kami akan berusaha menyelesaikan pembangunan dengan baik ya dengan cepat ya.

Nah kemudian apalagi yang kami upayakan setelah kami bingung bolak balik terus ke Meikarta tapi tidak ada apa penyelesaian yang signifikan atau jelas ya terutama penyelesaian *unit*-nya. Nah akhirnya kami sepakat, wah kami harus mengadu ke wakil rakyat kami nih ya kan, sehingga pada tanggal 5 Desember itu kami mencoba berunjuk rasa tapi dengan damai ya kan, menanyakan bagaimana pihak wakil rakyat kami itu bisa memberikan suatu perhatian yang lebih terhadap konsumennya yang lagi kesulitan, karena otomatis alasan daripada anggota kami ini untuk apa membeli *unit* itu, itu bermacam-macam. Karena memang waktu itu *unit*-nya harganya murah jadi ada juga ya tujuannya ada yang investasi tapi ada juga yang pengen mendapatkan hunian karena rumah udah harganya udah mahal gitu loh. Kemudian ada juga yang yaitu untuk diversifikasi bisnisnya karena sudah merasa capek misalkan buka contohnya ya toko atau warung sehingga dia mau ah nanti tinggal tunggu apa hasil dari sewa uang sewa apartemen tiap bulannya seperti itu, jadi semuanya itu kandas semua setelah gagal serah terima.

Nah kemudian pada tanggal 19 Desember itu kami mendatangi bank yang sebagai penjamin KPA yaitu Bank Nobu ya waktu itu nah untuk menanyakan statusnya juga, karena sebagian besar anggota kami itu selalu apa ditekan cicilannya terus walaupun *unit*-nya itu tidak jelas, bahkan dari pihak Nobu pun itu pihak bank pun dia tidak bisa menjamin juga kapan selesainya seperti itu ya. Jadi intinya betapa beratnya anggota kami dengan beban cicilan tiap bulannya sementara haknya itu sampai saat ini masih belum mendapatkan ya.

Kemudian dalam perjalanannya pada tahun 2020 kami mencoba menanyakan tentang progres pembangunan *unit* lagi ke pihak Meikarta ya, ternyata dijawab ada jawaban baru, kalau yang sebelumnya kan wah kita akan komitmen untuk membangun terus aja begitu, tahun 2020 ada jawaban baru pihak kami sudah melaksanakan PKPU, wah jadi bingung kita karena sebagian besar itu terus terang tidak mengetahui akan adanya PKPU karena tidak dilibatkan dalam rapat, kemudian tidak menyetujui atau menandatangani atau pun itu mewakilkan kepada pihak lain untuk menyetujui atau menandatangani seperti itu.



Jadi diantaranya di dalam PKPU itu disebutkan karena kan ditetapkan Desember 2020, setelah gagal serah terima 2018 gagal serah terima, kemudian 2020 pun itu mulailah di situ di dalam PKPU itu katanya mulai 24 bulan ke depan itu mulai ada pembangunan. Kemudian ditambah 55 bulan ke depan lagi itu mau dilaksanakan serah terima katanya di dalam PKPU itu. Ditambah lagi 6 bulan kalau ada yang mau *refund* Pak, ya jadi sehingga totalnya kami harus menunggu lagi 85 bulan ke depan ya kan lebih kurang sejak tahun 2020. Nah terus terang kami itu merasa keberatan ya terhadap PKPU tersebut. Bukan masalah keberatan atas *inkracht*-nya atau homologasinya PKPU Pak, tapi prosesnya, prosesnya itu yang perlu apa ditinjau kembali, karena sebagian besar daripada kami itu tidak pernah dilibatkan dalam prosesnya ya nah seperti itu.

Kami merasakan hak kami itu merasa terabaikan, namun apa tindakan mereka ya, terus apa tindakan Meikarta tersebut bukannya sadar malah menggugat kami dengan tuntutan kerugian materil dan immateril dengan nominal yang fantastis yaitu 56 miliar Pak, jadi kita malah dituntut balik 56 miliar ya, padahal

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak, itu 56 miliar dituntut kepada berapa orang?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Ya itu sebetulnya terhadap awalnya begini izin Pak Pimpinan saya menceritakan ya, itu di situ rancu sedikit agak rancu juga ada yang nyebutkan perorangan dan komunitas tapi pada waktu itu pengurus sudah masuk ke situ semua Pak. Waktu itu kan gara-garanya sebelum tanggal 19 waktu kami ini mau unjuk rasa di Nobu itu sudah ada surat peringatan, somasi dari pihak MSU Pak. Intinya jangan sampai lakukan itu tanggal 19-nya tapi saya kan melakukan itu tuh kami itu hanya untuk menanyakan status *unit* iya kan begitu, sehingga adalah yang hadir waktu itu Pak Pimpinan, ada yang hadir itu semuanya dijadikan tergugat eh di somasi dan dijadikan tergugat seperti itu. Jadi yang, yang mencurahkan kekecewaannya saja yang di luar itu namanya siapa langsung dijadikan tergugat gitu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ya sampai lambang Nobunya itu dicopot dulu gitu kan ya seperti itulah ya.

Jadi intinya itu 50 miliar itu karena katanya dengan akibatnya viral ini pemberitaan-pemberitaan ini akibat adanya komunitas ini yang sebelumnya mungkin belum pernah ada mereka jadi merugi katanya seperti itu ya kan. Ya padahal sebelumnya juga kan ya prestasinya sudah tidak ada bahkan, bahkan mungkin menurut saya sudah tidak bagus karena gagal serah terima wanprestasi gitu Pak ya dan ingkar janji.

Nah sehingga saat ini kami sedang menghadapi gugatan sebetulnya ya, mereka yang jelas tidak masuk logika dan kemampuan kami ya. Mereka menggugat pengurus komunitas Pak terutama pengurus komunitas KSB-nya



itu ada di dalamnya dan anggota lainnya yang pada waktu unjuk rasa hanya sekedar berorasi, sekedar menumpahkan kekesalannya, kekecewaannya, dan penderitaannya karena hak-hak mereka dilanggar oleh pihak pengembang.

Jadi oleh karena itu dengan diiringi rasa hormat kami maka kami selaku para tergugat memohon perlindungan **hukum** Pak, karena tuntutan kami tidak logis dan berencana mau memiskinkan kami. Selain tuntutan yang 56 miliar itu ada sita jaminan juga, sita jaminan aset ya. Jadi betul-betul tidak logis dan berencana mau memiskinkan kami. Kami bukanlah koruptor, kami hanya mau mendapatkan hak kami kembali sesuai dengan uang yang telah kami bayarkan tidak lebih tidak kurang, pokoknya yang disetor itu mohon dikembalikan.

Mungkin demikian sebagai pendahuluan uraian dari kami yang menjadikan alasan bahwa saat ini kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tidak tertarik lagi dengan unitnya ya dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk *refund* atau pengembalian dana baik itu ke PT MSU-nya sendiri bagi yang *cash* dan pihak perbankan bagi yang KPA.

Mungkin sebagai kronologis demikian secara detail bukti-bukti dan sebagainya itu kami sudah siapkan juga, ya Pak? Macam-macam Pak karena tergantung tipe ya, yang pasti kalau anggota komi kenapa? 200 sampai 1 miliar Pak nilainya itu. Baik ada lagi kira-kira silakan enggak masalah, mungkin itu aja.

KETUA RAPAT:

Entar dulu Pak sebentar.
Jadi yang Bapak mau sampaikan sudah?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Secara kronologis sudah ya itu aja secara singkatnya.

KETUA RAPAT:

Ada lagi yang mau bicara atau cukup dulu?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Cukup dulu Pak sementara.

KETUA RAPAT:

Oke ini saya rekap sedikit ya, jadi para konsumen ini dulu baik yang beli *cash* atau pun nyicil itu sebetulnya *first hand over* harusnya terjadi 2018? Sampai hari ini belum ada yang terima?



KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Belum Pak.

KETUA RAPAT:

Minimal yang dari kelompok Bapak ya?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Iya.

KETUA RAPAT:

Terus kemudian pada saat tahun 2020 dipertanyakan lagi ternyata sudah PKPU. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ini tahu enggak ada PKPU? Enggak pernah diundang? Oke. Dari PKPU itu dibilang bahwa pembangunan akan dimulai 24 bulan setelah PKPU, artinya mungkin tahun 2022 kemarin dan serah terima kepada konsumen kalau saya enggak salah tangkap itu baru akan terjadi mulai tahun 2027. Opsi yang pernah disampaikan tadi saya dengar ada kemungkinan di *refund* uangnya. Pernah ada enggak opsi untuk di *refund* uangnya?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Ada Pak.

KETUA RAPAT:

Tertulis atau cuma lisan? Pernah ada tawaran atau *offer* tertulis menawarkan ini boleh di *refund* atau

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Kalau tawaran dari pihak pengembang tidak ada *refund*, permintaan kita kepada pihak pengembang

KETUA RAPAT:

Ooh permintaan dari Bapak-Bapak untuk minta di *refund*.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Di *refund* saja Pak.

KETUA RAPAT:



Oke.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Dari *unit*-nya memang masih tanah merah makanya tidak akan mungkin.

KETUA RAPAT:

Intinya tidak ada tanda-tanda dibangunlah.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Tidak ada tanda-tanda Pak.

KETUA RAPAT:

Sekarang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ini udah pada lunas belum *unit*-nya?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Sebagian besar udah ada yang lunas yang, yang *cash* keras Pak sama *cash* bertahap dan sebagian lagi masih mencicil di bank yang sudah berjalan lebih kurang 5 tahun dari tahun 2017 sampai 2022 ini Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, lalu sampai hari ini dengan kasus PKPU tentunya Bapak-Bapak Ibu-Ibu masih ditagihkan cicilannya?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Masih, masih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke baik itu dulu kira-kira

F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):



Jadi selain daripada komunitas ini memang belum ada penyerahan satu rumah pun dengan misalnya yang bisa bisa diapain, maksudnya belum ada sama sekali **penyerahan?**

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Belum, belum Pak anggota komunitas ya?

F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

Kemudian

KETUA RAPAT:

Bukan, yang ditanya beliau di luar komunitas dan sudah serah terima.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Ada, ada itu kan ada 3 *district* ya, 3 *district* itu ada *district* 1, *district* 2, *district* 3 ya. Nah yang *district* 1 itu ada sebagian yang sudah diserahterimakan itu sampai saat ini tuh menurut informasi CEO-nya itu Veronika Sitepu ya bahwa 2021 itu September itu diserahterimakan sekitar 1.500 *unit* ya, 2022 Desember itu 1.800 *unit* ya. Jadi kenapa itu, terima kasih pertanyaannya Pak, jadi saya menjelaskan, kenapa kita tidak mungkin 2027 itu bisa diselesaikan? Karena kita kalau lihat memakai logika matematis ya. Bulan waktu 2017 itu pada saat *launching* saja itu 16.800 *unit* itu laku terjual menurut konferensi pers mereka 16.800 ya. Nah bagaimana caranya kalau misalkan sampai saat ini saja itu baru diserahterimakan itu, itu 1.500 ditambah 1.800 itu kan sekitar 3.300, yang 2017 aja itu masih belum selesai. Dan menurut CEO mereka juga bahwa sudah *corporate* sekretaris itu bahwa sudah terjual sampai 2000 September 2022 itu sekitar 130.000 *unit*.

Kalau kita analisa dari tahun 2021 ke 2022 itu cuma kemampuan mereka itu cuma 300 *unit*. Seandainya, seandainya 2027 ya kan berarti kan tinggal berapa ta ini lagi taruhlah 5x300 jadi tinggal 1.500 lagi, ditotal-total itu paling bisa menyelesaikan sekitar 3.300 ditambah 1.500.

KETUA RAPAT:

Benar, benar Pak itu kan 3.300 diserahkan dalam dua tahun itu kan?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Iya.

KETUA RAPAT;



Iya berarti kalau pakai matematik itu kurang lebih mungkin ada 5.000 lagilah yang dia bisa serah terimakan, sedangkan hutang *unit*-nya ada 130an ribu. Unit yang sudah diserah terimakan Bapak bisa tunjuk di mana?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Rata-rata di *district* 1 itu pun belum selesai semua.

KETUA RAPAT:

Tapi pernah ketemu konsumen yang sudah diserahterimakan itu?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Pernah Pak.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):

Izin Pimpinan bisa tanya enggak?

KETUA RAPAT:

Ditanyakan ternyata itu benar ya? silakan ini yang punya dapil itu.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):

Dapil saya masalahnya dan saya yang dari awal menentang itu. Saya mau tanya Pak, pertama adalah ketika penyerahan yang *district* 1 itu mereka tambah uang enggak? Itu perlu kita tahu juga, karena ada penawaran kan ketika ini tidak dibangun mau pindah *district* naik harganya hampir 100 kali lipat apa 100% lah. Kedua kalau katanya mau ditarik yang bayar *cash* itu, itu potongannya itu berapa puluh persenlah mungkin 20% atau berapa. Jadi orang belum akad kredit setor duit baliknya udah hilang duitnya. Nah coba jelaskan itu Pak.

Terima kasih.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Baik Pak terima kasih Bapak.

Izinkan Pak Pimpinan saya jelaskan sedikit ya, ini kebetulan rekan-rekan ada buktinya Pak mengenai itu, jadi di dalam PKPU pun diantaranya isinya itu adalah bagi yang pembangunannya sudah di atas 20% itu dikasih opsi relokasi tapi dengan syarat yang setara ya luasnya, artinya bahwa kalau pun ada penambahan atau pun ini diupayakan itu sama harganya. Nah tapi ternyata dalam perjalanannya itu jadi uang yang sudah disetorkan itu malah cukup untuk jadi DP-nya saja ya. Nah nanti mungkin izinkan langsung bisa dijelaskan korban ini salah satu korban jadi tidak mungkin jadi kita ratusan juta lagi dan kalau dikembalikan itu misalkan dari 300 itu cuma terima kurang lebih 100 Pak misalkan, jadi kurang lebih 30%-nya itu seperti itu. Mungkin

KETUA RAPAT:

Iya jadi kalau Bapak bayar lunas 300 juta, Bapak bayar lunas 300 juta dikonversi menjadi *unit* lain 300 juta ini dihitungnya 100 begitu?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP Mulyana):

600 pak, iya betul kurang lebih, itu kebetulan Pak Idris ya. Ya silakan Pak dijelaskan.

KETUA RAPAT:

Kayaknya beliau juga korban ini, oh iya, iya silakan ini kita dengar dari korban deh kalau gitu.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP Mulyana):

Pak, Pak Pimpinan izin anggota kami yang merasakan sendiri, makasih Pak Pimpinan.

ANGGOTA KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

**Yang terhormat Ketua Pimpinan dan Anggota Komisi VI,
Yang terhormat Ketua BKPN dan Anggotanya,**

Nah saya menceritakan gini Pak, saya bergabung di komunitas ini setelah mendengar berita tanggal 5 Desember 2022, tanggal 9 saya bergabung. Nah saya sendiri pada dasarnya sejak 2019 berjuang untuk mempertanyakan kapan *unit* saya di *hand over*. Nah saya melakukan transaksi atau pembelian di Meikarta itu tanggal 14 November 2017 tertulis di P3U itu di *hand over* tanggal 30 November 2019. Nah 2019 saya datang saya menanyakan *unit* saya di *district* 3 sepertinya di *tower* 67005.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Bapak udah bayar tunai atau nyicil atau

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA:

Nyicil, nyicil saya Pak nyicil, saya ambil 3 *unit* memang peruntukan untuk diwariskan ke 3 orang anak saya saat itu, saya juga membeli di apa namanya di pada saat mereka melakukan *launching* atau promosi di kota saya Pak di kota tempat tinggal saya Pak di Kota Serang. Nah 14 November 2017 saya memesan 3 *unit* di P3U-nya itu dituliskan akan di *hand over* tanggal 30 November 2019. 2019 saya tanyakan kapan *unit* saya di apa dibangun pada saat 2018 kok udah bermasalah Pak ketika ada permasalahan



diperizinan, tapi karena saya maksa hari itu masih berkeyakinan bahwa ini adalah pengembang besar Lippo Group saya masih punya yakin bahwa *hand over*. Akhirnya April 2019 saya di karena *hand* apa *unit* saya belum diserahterimakan saya dipindahkan ke *tower* lain ke 56010 dengan luasan yang setara. Nah saat itu 2019 itu saya tidak, tidak apa ya hanya melanjutkan cicilan tidak ada tambahan DP. Nah di P3U April 2019 diunit 56010 dijanjikan akan di *hand over*-kan di tanggal 30 November 2020, 2020 pun belum di *hand over*. Nah saya juga gini masih saya mungkin masih terlalu yakin bahwa ini pengembang besar itu tidak akan ingkar Pak, sampai 2021 saya mulai bergerak mempertanyakan ini sendiri Pak *by email, by wa, by phone* ke pada Meikarta. Akhirnya saya datang tanggal 18 Desember tahun 2021.

Nah yang saya pertanyakan hanya saya minta tertulis kapan *unit* saya dipindahkan. Hingga April 2021 itu, itu belum ada, belum ada kepastian juga pada dasarnya saya harusnya udah marah Pak ya dalam artian mungkin perasaan saya juga sama dirasakan oleh pembeli lainnya, karena sudah *invest* banyak. Karena invest ini pada dasarnya kan dengan penghasilan saya pada saat saya memaksakan diri Pak untuk melakukan pencicilan. Nah kemudian saya tidak dapat kepastian juga akhirnya si saya ditawarkan *hand over* ditawarkan lagi untuk relokasi ke *district* 1 yang disampaikan Pak Aep tadi, karena di *district* 1 apa namanya ada udah *unit*-nya, ada *unit*-nya, nah itu Februari tahun 2022. Nah di 2022 itu dijanjikan akan dipindahin *over* Mei tahun 2022 itu juga. Nah pada saat *hand over*, pada saat relokasi Februari 2022 saya sudah membayarkan sekitar 546 juta Pak, tetapi *unit* yang di *hand over* ini yang direlokasi adalah dihitung sebagai *unit* baru dengan harga baru, tetapi jumlah uang saya setorkan hanya dihargai 354 juta sekian atau lebih kurang saya akan saya rugi sudah hampir 200 juta Pak. Nah kenapa saya lakukan ini Pak?

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak, Bapak bayar 540 sekian juta itu untuk 3 *unit* atau untuk 1?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA:

3 unit Pak.

KETUA RAPAT:

3 *unit* kan?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA:

3 *unit*.

KETUA RAPAT:



Oke, alasannya apa dia waktu dipindahin apa *unit*-nya lebih besar sehingga harganya naik?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA:

Memang gini Pak, pada saat saya minta relokasi dengan *unit* yang sama karena memang tujuan tadi diwariskan, tetapi karena di *tower* yang baru ini atau *district* 1 tidak ada *unit* yang sama oke saya akhirnya apa namanya memilih dengan *unit* yang lebih besar, tapi dari total luas 3 *unit* menjadi *unit* 1 dan itu lebih kecil Pak. Saya unit 3 unit itu masing-masing 37,5 meter persegi sementara *unit* baru hanya 71 meter persegi. Nah kenapa saya lakukan? Karena gini Pak saya mau, saya mau, mau pasti bahwa *unit* saya ada sebab saya tidak bisa uang saya tidak bisa kembali Pak, tidak bisa kembali. Oke konsekuensi 500 juta itu saya ambil, karena apa? Saya juga pada dasarnya keluarga saya Pak itu resah, kita terus mencicil kemudian barang yang kita beli tidak ada, tetapi hingga Mei atau dijanjikan itu juga tidak ada hingga November 2022 tanggal 28 itu juga tidak ada saya bersurat bahwa saya menyatakan menghentikan atau tidak melakukan pembayaran cicilan. Nah tanggal 28 November itu juga saya baru tahu bahwa itu ada PKPU Pak. Kita sendiri konsumen atau pembeli baru tahu ada PKPU pada dasarnya November 2020 saya baru baru diberi tahu tanggal 28 November tahun 2022.

Nah saya *stop* mencicil tapi hingga saat ini Pak itu Bank Nobu selalu melakukan penagihan ya wa, sms, maupun email dan ada sedikit apa namanya, mungkin ancaman ya jadi kalau misalnya saya tidak melakukan pencicilan mereka akan melakukan apa namanya, *warning* sehingga saya tidak apa BI apa ya? BI *Checking* Pak sehingga saya tidak bisa lagi melakukan apa namanya kredit di bank seperti itu.

Jadi saya bergabung di sini di komunitas ini jadi ikut berjuang bersama teman-teman ini pada dasarnya kami menginginkan bahwa hak-hak kami sebagai pembeli dikembalikan Pak. Sebab kami sekarang membeli barang tidak ada wujudnya Pak sementara sebagian dari kami ini bukan sebagian ya, kami-kami di sini terus mencicil Pak dan kalau tidak mencicil tadi ancaman akan di *warning* dengan BI *checking* seperti itu.

Demikian Pak terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

Terima kasih, izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.



F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

Ini yang kan ada yang sudah lunas atau *cash* keras ada yang masih mencicil. Biasanya *developer* itu yang walaupun enggak dikerjakan atau mangkrak cicilan-cicilan itu kita masih dipaksakan untuk dibayar apa dilakukan itu.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Betul

F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

Dilakukan jadi Bapak bayar?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Tetap harus mencicil.

F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

Saya begini punya pengalaman juga demikian hampir sama dengan Bapak juga saya alami tetapi saya *stop* cicilan waktu ya dan akhirnya tapi syukurnya pada ujungnya itu selesai bangunan. Waktu berhitung karena saya belum bayar ada cicilan yang dibayar karena saya enggak mau bayar karena bangunan itu waktu enggak jalan tapi mereka *share*, akhirnya pada akhirnya mereka menghitung berapa saya punya *pinalti* karena enggak membayar cicilan tapi saya juga mengklaim dia satu termin per hari atas keterlambatannya, kan *win-win solution* jadi akhirnya itu waktu saya bayar ya saya mesti dikasih minus 11% karena lebih banyak *pinalti* dia dan itu mungkin itu bisa nanti harus dilakukan yang demikian, namanya perjanjian kan ada hak dan ada kewajiban dan bukan juga itu *problem* yang kedua nanti coba lihat nanti Pak sertifikat. Saya juga pengalaman di sini membeli apartemen, bayangkan sertifikatnya nanti hampir 12 tahun baru saya terima setelah saya lunasi, *problem* lagi nanti di sertifikat.

Jadi coba kita bayangkan tadi setelah PKPU dia mengatakan bahwa nanti 2 tahun baru dibangun Bapak terus dilakukan pembayaran kewajiban jadi *apa*, jadi Bapak juga harus menghitung dong kalau punya keterlambatan sekian per mili 1 mili per hari itu sudah merupakan undang-undang setiap keterlambatan, enggak ada masalah. Hendak katakan bahwa itu nanti sekian tahun oke, tetapi tolong juga mungkin pada 5 tahun itu harusnya kalau berhitung Bapak tidak perlu bayar lagi kekurangan itu karena itu Bapak juga punya cara yang ini memang permainan-permainan *developer* banyak yang demikian enggak mau tahu haknya konsumen sedangkan dia punya hak harus dibayar oleh kita semua kan ini menjadi *problem*.

Dan harusnya apa itu *fair* adalah dia harus membayar keterlambatan itu 1 per *unit* per hari hitung sekian tahun sekian tahun. Kalau perlu kalau saya dulu enggak mau bayar, saya enggak mau bayar untuk apa saya bayar endak kita kayak membeli apa ini, nanti bayar-bayar kita terjerumus. Kita dipaksakan membayar kita harus ngutang untuk membayar disisi lain dia tidak memenuhi kewajibannya. Ya mungkin itu Pak nanti mudah-mudahan saya bisa bantu karena saya punya pengalaman untuk itu walaupun saya bukan punya dapil ya, ada di sana yang punya dapil.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Baik terima kasih mohon izin untuk menjelaskan sedikit, yang kaitannya dengan Bapak, haduh mohon maaf Bapak

KETUA RAPAT:

La Tinro mantan Bupati dua kali nih.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Salam kenal Pak.

F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

Iya makasih.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Saya tadi ini Bapak Pimpinan, itu tadi mungkin ada yang terlewat dijelaskan ya kan. Kalau umpamanya jenis *developer*-nya seperti yang Bapak sampaikan kami senang sekali Pak, terus terang kami semua senang sekali tapi ini dari awal saja, dari awal nih saya contohnya bukan orang lain. Saya contohnya itu begitu tiga bulan setelah, saya kan sistemnya *cash* bertahap ya ada buktinya dilampirkan, begitu tiga bulan saya dipanggil lagi ke sana ya kan. Untuk apa nih dipanggil, katanya mau relokasi, ya relokasinya itu memang tidak berbayar ya kan tidak berbayar katanya supaya cepat dibangun seperti itu, tapi saya baru tahu itu ada perubahan ketentuan sepihak di syarat ketentuannya. Jadi ada *pinalti*nya itu asalnya 1% setiap keterlambatan, di amandemen itu dirubah sepihak jadi setengah persen, hurufnya kecil-kecil banget Pak. Saya sampai nyebut kecil memang enggak kebaca hampir enggak kebaca Pak ya.

Nah di samping itu ada ditambahin lagi masa tumbuh atau *grass period* enam bulan. Jadi saya perasaan ini kok sepihak begitu, nah setelah dipertanyakan ya jawabannya ya itu ketentuannya seperti itu, wah tidak bisa saya tidak menerima seperti itu. Nah bahkan sekarang ada lagi yang diakali bukan hanya masa tumbuh enam bulan bahkan sampai 18 bulan masa tunggu dan itu pun sudah terlewati ya tetap aja sampai saat ini juga tidak ada

itu *unit* yang dari anggota kami yang bisa terima sampai saat ini HO seperti itu.

F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

Tapi disuruh menunggu Bapak enggak dikasih tahu waktu tunggu ini apa kompensasi untuk saya.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Itu awalnya sebelum PKPU ya, izinkan saya sampaikan, sebelum PKPU itu ada *pinalti* ya jadi yang tidak bisa diterima juga secara matematis. Jadi *unit*-nya belum ada tapi *developer* tuh menjelaskan bahwa pembangunan sudah di atas 60% walaupun itu masih tanah merah. Nah sempat dipertanyakan bagaimana cara untuk menghitungnya? Jawabannya hanya satu yang menghitung itu adalah *independent* katanya, analisa *independent* pokoknya unit saya itu diklaim sudah 64% waktu itu *tuh* padahal bangunannya masih belum ada, nah itu katanya termasuk fasilitas ya memang fasilitas tapi secara perhitungan tidak masuk Pak kita tidak bisa terima. Nah pasca PKPU jadi berubah lagi, aturan-aturan yang sebelumnya tidak berlaku mau telat berapa tahun pun itu hanya 5% Pak maksimal.

F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

Iya maksimal 5% denda?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Denda, keterlambatan, tapi ya makanya kami keberatan dengan, dengan isinya PKPU atau prosesnya gitu loh seperti itu Pak.

F-P.GOLKAR (M. SARMUJI, S.E., M.Si / WAKIL KETUA):

Pak izin Pak Pimpinan.

Kalau saya melihat ceritanya mendengar ceritanya tadi kok seperti Bapak-Bapak ini dalam posisi yang sama sekali tidak berdaya ya menghadapi *developer* ya? Kira-kira faktornya apa Pak satu. Nanti saya juga minta tanggapan dari BPKN kalau nanti sudah presentasi lalu disimpan pertanyaan ini. Apa yang bisa dilakukan BPKN kalau menghadapi *problem* semacam ini? Biar juga kan *problem* semacam ini pasti pernah terjadi atau bahkan terulang dikemudian hari atau di tempat lain ada yang terjadi juga gitu. Kira-kira apa Pak faktornya kok seperti sangat tidak berdaya? Di relokasi, terus masih yang nyicil juga harus tetap bayar, barangnya belum tentu ada, kan kacau sekali itu.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):



Baik terima kasih Pak.

Jadi memang faktanya seperti itu, ketidakberdayaan kami itu karena memang kita tidak tahu, kami *tuh* awalnya tidak tahu solusinya kemana sih permasalahan ini dan kita sempat berupaya untuk menyampaikan surat keluhan ya diantaranya ke BPKN, kemudian kemana lagi? Ke Ombudsman, ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ya, kalau Ombudsman belum, belum baru akan itu. Nah kemudian sempat ke ini juga Pak ya ke wakil rakyat kita juga sih seperti itu. Jadi ya memang kami tidak tahu mau ke mana ini masalah kami itu, mau siapa yang kira-kira apa bisa mensolusikan masalah kami karena selama ini ya kami karena uang sudah masuk ke *developer* ya otomatis kan berarti pemain caturnya kan beliau-beliau Pak kita enggak bisa lagi.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Ini bentuknya seperti misalnya Pak Linro pengembang saya pembeli, saya beli rumah aja saya bayar selanjutnya saya dapat rumah atau tidak dapat rumah. Kalau Bapak ini bentuknya seperti itu apa memang seperti menaruh uang investasi sama kontraktor, selanjutnya kontraktornya beli tanah dan kita bisnis bareng-bareng gitu loh apa begitu bentuknya?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Terima kasih atas pertanyaannya.

Jadi bukan seperti itu Pak, kita cuma beda aja kalau kita termasuk yang KPA (Kredit Pemilikan Apartemen) kalau biasanya kan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) gitu kan Pak? Nah dua-duanya pun ada yang beli *cash* ada yang melalui kredit, kalau *cash* tuh langsung Pak, yang *cash* itu yang *cash* keras itu langsung melalui *developer*-nya jadi tidak melalui penjamin keuangan seperti bank gitu. Jadi di kami itu ada *problem* itu ya yang *cash* itu ke MSU-nya langsung, yang kredit itu KPA ke bank-banknya.

KETUA RAPAT:

Pak di grup Bapak yang bayar *cash* ada berapa?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Sekitar 30an Pak 30 sampai 40.

KETUA RAPAT:

Yang bayar tahapan?

F-P.GOLKAR (M. SARMUJI, S.E., M.Si / WAKIL KETUA):

Ada yang lunas, ada yang lunas sudah ada yang lunas?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Iya yang lunas ada.

F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si / WAKIL KETUA):

Yang lunas sudah dibangun?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Belum.

F-P.GOLKAR (M. SARMUJI, S.E., M.Si / WAKIL KETUA):

Belum juga?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Belum juga Pak saya dari 2018-2019 lunas sampai sekarang belum.

KETUA RAPAT:

Oke mungkin kita boleh berlanjut ke ini dulu BPKN. Bapak La Tinro ada yang mau ditanya? Ini konsumen

F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

Coba dulu aja tertarik tadi dari yang sudah bayar ini lunas ya hitung aja Pak sesuaikan dengan bunga bank nanti klaim harus kembalikan duit saya sekian.

KETUA RAPAT:

Wah luar biasa itu.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Jadi gini Pak, nambahin Pak, izin Pimpinan.

Sebenarnya kita dari konsumen ini awalnya ketertarikan itu dari iklannya yang ngomong membabi buta, dengan harapan harga yang demikian di wilayah Jabodetabek ini bisa memiliki hunian yang layak dan prestisius. Jadi kita tertarik walaupun cara pembayarannya ada yang melalui *cash* keras, *cash* bertahap, dan pembiayaan Lembaga Perbankan. Kenapa kebanyakan perkumpulan ini melakukan melalui Lembaga Pembiayaan, karena pasti ada saringan, berarti sudah ada kepastian dalam hal legalitas dan *unit*-nya. Dan komunitas kita sudah berulang kali bertanya kepada Lembaga Pembiayaan bagaimana *unit*-nya apakah sudah diselesaikan? Kalau pun belum legalitasnya apa yang sudah dipegang? Karena berdasarkan perjanjian kredit

di situ ada tertulis agunan, jaminan. Nah itu yang tidak bisa diberikan oleh Lembaga Pembiayaan kita menawarkan solusi, apakah boleh kita kok cicilan saja sampai ada kepastian *unit* dan legalitasnya? Namun jawaban dari pihak Lembaga Pembiayaan itu tidak bias, wajib dilakukan pembayaran. Demikian juga dengan yang *cash* keras kita mempertanyakan kepada MSU sebagai pengembang kapan ini dibangun, bagaimana legalitasnya apakah sudah ada, bagaimana dengan izinnya? Dan mereka tidak pernah mau memberikan jawaban pasti, semenjak keluarnya PKPU mereka selalu berlindung di putusan PKPU, yang notabene kita sebagai anggota ini tidak mengerti apa itu PKPU dan itu hal baru apakah itu sejenis makanan kita juga tidak tahu, nah...

F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

Dari yang pembiayaan ini tadi kan ada melalui pembiayaan, dari pembiayaan ini memberikan kepada *developer* langsung 100% gitu?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Nah itu yang kita tidak tahu kalau kita pertanyakan mereka selalu jawabannya itu adalah rahasia kami, itu adalah rahasia kami itu dari pihak. Jadi kita sebagai konsumen merasa seperti tertipu. Kalau pun memang ada *unit*-nya tolong ditunjukkan mana *unit*-nya, kita kepada pihak pengembang kalau pun belum selesai coba ditunjukkan unit-nya, mereka tidak mau menunjukkan dan kita hanya cari tahu seperti yang di *district* 3 itu hanya tanah merah dan kubangan yang dipenuhi oleh hewan ternak.

Jadi itu merasa kita kekesalan kita sudah menawarkan kepada baik pihak pengembang tolong dikembalikan saja uang yang telah kami setorkan tanpa kami perhitungkan inflasi yang ada. Kalau kita perhitungkan dari 2017 dengan harga semen tahun 2017 dengan sekarang pasti jauh berbeda. Kalau pun mereka akan melakukan pembangunan secara matematis maaf Pak Pimpinan, tidak akan mungkin mereka melakukan pembangunan karena akan biayanya akan dua kali lipat. Ya sudah dikembalikan saja uangnya, mungkin kami bisa menggunakan untuk hal-hal yang produktif lainnya, apakah kami akan membeli rumah yang tipe sederhana, rumah tapak kan sudah lumayan daripada seperti ini kami banyak membuang waktu, energi, dan pikiran pada Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

User yang sangat baik.

KETUA RAPAT:

Baik ini saya rasa kita cukup dari konsumen, kita ke BPKN untuk memberi penjelasan.



KEPALA BPKN RI (RIZAL HALIM):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang kami hormati Bapak Mohamad Hekal, Pak Sarmuji selaku Pimpinan sidang hari ini, kemudian Para Anggota Komisi VI yang kami hormati, Bapak, Ibu dari Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta,

Ini menarik apa karena ini cukup lama dan maraton, kasus ini merebak di 2017 akhir, kemudian ada persoalan apa tangkap tangan di sana, kemudian bermasalah lah kira-kira proyek Meikarta ini, jadi ada lahan yang dianggap tidak *clean* dan *clear* pada saat itu. Pada saat itu ribut di media ramai terjadi kepanikan konsumen, kepanikan pasar yang sudah memesan *unit*.

2018 dan 2019 BPKN menerima pengaduan sebanyak 9 pengaduan dari masyarakat yang komplain terhadap pemesanan *unit* di Meikarta, 9 *unit* pengen uangnya dikembalikan kira-kira dan *alhamdulillah* pada saat itu 5 dari 9 konsumen ini dikembalikan dengan opsi tiga opsi. Pertama opsi pertama ditawarkan untuk pindah lokasi ke lokasi yang *clean* dan *clear*, kalau tidak mau dipindahkan ditawarkan oke dikembalikan duitnya tapi *unit*-nya akan dijual di pasar sekunder itu pilihan kedua, yang ketiga kalau juga tidak mau ya udah duitnya dikembalikan dengan perhitungan biaya-biaya.

Itu kesepakatan kami dengan MSU pada saat itu karena kami ke lapangan pada saat itu, di lapangan kami buat kesepakatan itu dan kami memasang apa pengumuman pada apa konsumen jika ada yang ingin silakan ke kantor atau bisa waktu itu ada GM yang ditempatkan berhubungan dengan BPKN dan GM MSU untuk meng-*handle* konsumen. Jadi tanpa harus kami mengurus ini 2018-2019 Pak, jadi dan 2019 terakhir udah selesai kecuali empat konsumen yang di perbankan. Ini perbankan ini agak sulit karena sistemnya berbeda, bisnis prosesnya berbeda dan selalu mengatakan ini harus mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Namun dengan mengundang Otoritas Jasa Keuangan dan apa tidak menemukan solusilah kira-kira sampai terakhir gitu tapi dengan *developer* itu bisa kita selesaikan.

Nah masalah muncul ketika ada pembayaran apa penagihan hutang dari vendor-vendor Meikarta yang mulai panik, majulah proses permohonan PKPU di 2020 dan putusan PKPU itu termasuk di sana mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban teman-teman dari pemesan atau calon konsumen. Nah kalau kita lihat di sini mungkin bisa saya sudah bawa putusannya kalau bisa dilihat proposal perdamaianya ini yang disahkan. Kalau dilihat dari ini kan proposal ini bisa disahkan kalau dia kuorum kalau melihat persentasinya 99,2% yang, di sini enggak disebutkan Pak, di sini enggak kelihatan jumlah pemesannya tapi di sini diatur hak dan kewajiban pemesan termasuk yang tadi disampaikan ada keterlambatan serah terima, ada denda kalau terlambat



dan seterusnya. Hanya memang saya tidak melihat mekanisme serah terimanya seperti apa, yang saya lihat di proposalnya saja terus ke bawah di bawah itu ada proposal ini putusan-putusannya aja yang di bawahnya ada proposal mekanisme perdamaian.

Itu kalau melihat durasinya itu sejak Maret 2021, sorry 2023 sampai Desember 2025 proses serah terima *unit* secara bertahap, tapi saya enggak tahu di sini tidak ada data-data di apa proposal ini data-data siapa yang menerima lebih awal, siapa yang menerima terakhir, dugaan saya itu ada di pengurus, tim pengurus PKPU ini.

Nah kalau melihat status hukumnya putusan yang seperti ini sifatnya *in kracht*. Jadi saya kami waktu itu menerima surat dari Bapak-Bapak 2021-2022 ada lagi pengaduan kita sudah balas, kami enggak bisa melakukan intervensi ke sana karena itu *in kracht*, tetapi kalau ada pembicaraan legislator dengan yudisial Komisi Yudisial bisa saja enggak tahu mungkin ada yang sifatnya terobosan hukum dan sebagainya, tapi kalau kami untuk me apa melakukan intervensi terhadap putusan ini agak rumit. Nah yang bisa dilakukan adalah berkomunikasi dengan hakim pengawas karena hakim pengawas yang ditugaskan oleh pengadilan untuk mengawasi proses pelaksanaan proposal perdamaian ini.

F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

Izin Pimpinan.

Tadi kan sudah ada yang bisa diselesaikan dalam tiga alternatif, nah hubungannya dengan mereka ini kenapa enggak diselesaikan atau gimana itu?

KEPALA BPKN RI (RIZAL HALIM):

Saya teman-teman ini enggak tahu, saya waktu itu belum ketemu teman-teman ini. Jadi kami ke lapangan 2018-2019 itu ada foto-fotonya kami videoin semua *tuh*, kita umumkan, kita sampaikan konsumen 9 orang ini sampaikan ke teman-teman masyarakat yang lain kalau ada tolong kabarin, terus kata pihak Meikarta waktu itu, baik Pak kami tempatkan orangnya di kantor Bapak jadi Bapak enggak perlu buat surat biar mereka enggak perlu surat-suratan, bisa datang, bisa langsung diselesaikan dengan tiga opsi itu. Tapi sampai selesai cuma 9 orang itu.

F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

Yang ngomong sama Bapak cuma 9 orang atau 9 kelompok?

KEPALA BPKN RI (RIZAL HALIM):

9 orang.

F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):



9 orang inilah yang menerima tiga alternatif itu?

KEPALA BPKN RI (RIZAL HALIM):

Iya, saya nawarkan ke 9 orang ini sampaikan, dia bilang kami punya kelompok juga Pak ada ratusan ajak ke sini tapi enggak datang-datang. Bukan saya *buying time*

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak La Tinro.

Ini Bapak udah selesai materinya atau ada lagi yang mau disampaikan?

KEPALA BPKN RI (RIZAL HALIM):

Dikit lagi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Biar diselesaikan dulu sebelum kita potong-potong ya sebentar.

KEPALA BPKN RI (RIZAL HALIM):

Nah dari hasil proposal perdamaian itu sebenarnya kita bisa melihat di sini apa ada juga diakui dalam proposal ini bahwa kalau pemesan pengen membatalkan ex pemesan disebutnya itu ada kriterianya di bawah ex pemesan, ada kriteria bahwa dia tidak melakukan kewajibannya sekian lama, jadi bisa dikembalikan dananya, **ada mekanisme** pengembaliannya pertanyaannya adalah apakah ini sudah berjalan atau tidak? Nah itu dalam konteks PKPU biasanya diawasi oleh hakim pengawas, nah itu yang harus di apa dikomunikasikan dengan hakim pengawas.

Mungkin itu Pimpinan yang bisa kami sampaikan memang saya juga agak rumit apakah apa kecuali memang apa legislatif bisa menggunakan kewenangannya untuk berkoordinasi dengan yudikatif karena ini ada di wilayah yudikatif ya. Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Tadi Pak La Tinro selesai habis itu Pak Daeng.

F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

Pak Daeng dulu atau saya? Makasih

Yang tadi ada kan 9 Pak, sepengetahuan Bapak yang 9 ini sudah *clear* semua? Sudah *clear* ya. Kemudian dari teman-teman ini dimasukan juga



surat ke Bapak yang akhirnya ada keputusan yang menurut mereka tidak diundang dan tidak diberitahukan tiba-tiba ada keputusan, coba penjelasannya Pak.

KEPALA BPKN RI (RIZAL HALIM):

Saya enggak ngerti nih kenapa kalau melihat berita ini karena putusan ini saya juga coba baca, mereka coba umumkan di harian Republika dan harian Terbit, ya menurut saya Republika termasuk harian besar, saya enggak tahu, saya enggak ngerti teman-teman enggak, saya juga pas 2019 kami udah menganggap ini enggak ada masalah udah selesai *clear*, enggak ada masalah dan waktu itu MSU sangat kooperatif menurut saya karena mereka datang langsung ke kantor, datang menempatkan orangnya untuk menerima aduan masyarakat dan disampaikan kepada 9 orang ini untuk mengajak teman-temannya, tapi sampai habis selesai tahun 2019 enggak ada lagi yang datang.

F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

Kalau dari BKPN tidak pernah mendengar bahwa sudah ada solusi yang 9 orang ini?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Jadi gini izin Pak, kalau kita berbicara melihat PKPU tersebut kita datang ke MSU dan ke pihak perbankan kita didudukannya sebagai kreditur konkuren. Jadi kalau kita lihat kreditur konkuren di dalam PKPU itu ada 15.800 sekian berarti kalau 15.800 sekian berarti itu konsumen termasuk kita. Dan kita tidak pernah disurati, kalau kita baca dari PKPU tersebut hakim pengawas memerintahkan kepada pengurus untuk memberitahukan melalui surat tercatat itu, surat tercatat atau kurir dan itu pun tidak pernah kita terima. Jadi bagaimana kita bisa tahu ada suatu produk hukum yaitu PKPU yang di homologasi atau pun yang telah dikatakanlah oleh Ketua BPKN untuk diberitahukan kepada kita bahwa ada opsi-opsi yang diberikan kepada konsumen dalam hal ini kita korban Meikarta Pak. Jadi situ kita bingung karena kita tidak pernah diberitahukan, diikutsertakan dan dilibatkan.

Nah jadi kita berpikiran mohon maaf Pimpinan dan Bapak-Bapak kalau pun mungkin kita dilibatkan kemungkinan PKPU ini tidak akan ada, pasti kita tidak, kita akan menolak jadi 99,2% yang diklaim mereka setuju kita pastikan kita tidak akan terima. Bagaimana kita mau menerima dari 2017 sampai 2019 itu *hand over* berarti mereka tidak melaksanakan berarti mereka telah wanprestasi. Bagaimana kita sampai lima tahun tujuh tahun ke depan mau menerima unit yang telah dijanjikan jauh sebelum itu kita akan terima tidak masuk akal, logika sehat manapun kita bawa matematik ke manapun tidak akan bisa Pak. Jadi pasti kita tidak akan menyetujui bagaimana PKPU ini harus kita patuhi. Jadi di sini kita bukan menganggangi produk hukum bahwa putusan itu tidak benar tidak Pak, itu karena sudah *in kracht* kita harus patuhi tapi yang mau kita pertanyakan bagaimana prosesnya? Apakah 99,2% itu



kami ada di dalamnya, itu yang kita pertanyakan Pak. Kalau kita pertanyakan mereka, mereka tidak pernah mau memberikan *statement* dan hanya diam, karena mungkin logikanya mereka diam lebih baik, mungkin itu bagi mereka pihak MSU Pak. Jadi kita sekarang terombang-ambing makanya kita melalui Wakil yang terhormat di sini mohon membantu kami, menjembatani kami, memfasilitasi kami untuk hal ini.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Pak Hekal ini mau interaktif terus atau bagi-bagi?

KETUA RAPAT:

Ini Pak Daeng, Pak Daeng dulu baru Pak Andre.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):

Iya makasih Pimpinan.

Yang saya hormati korban dari Meikarta,

Pertama adalah saya rumahnya dekat dengan Meikarta, saya dapil di sana tapi kebanyakan konsumen Meikarta bukan orang Bekasi itu. Cuman saya ingin bersuara terhadap Bapak-Bapak sekalian. Dari awal Meikarta ini kalau dibilang tadi oleh BPKN korporatif *bullshit* omong kosong. Saya orang situ Pak, saya orang situ. Kasus Pemda Bekasi, Bupati ditangkap dan lain-lain itu bukti, sebenarnya udah enggak benar proses di sana itu. Jangan dibilang korporatif dan lain-lain, pengaduan yang di sini *tuh* cuma berapa, yang ke rumah saya banyak, yang *cash* bayar 2017 sampai hari ini tidak jelas juga *unit*-nya. Proses-proses seperti ini sebetulnya menurut saya adalah suatu proses penzaliman. Kita menjadi sulit karena apa? Ini perusahaan besar oligarki. Bapak tahu Lippo *tuh* singkatannya apa? Lippo Cikarang, Bapak singkat sendiri deh gitu loh. Ya iya Lippo Cikarang singkatannya apa? Saya tahu betul kok.

Pertama begini saya ingin katakan ke Pimpinan, DPR tidak boleh diam dengan kasus Meikarta karena ini akan menjadi paradigma ke depan. Masyarakat kita jangan pernah dikorbankan gitu loh. Mereka berharap punya unit untuk masa depannya dan lain-lain saya tahu betul saya Tanya, mungkin yang di sini kumpul cuma 130 orang, ribuan di sana Pak. Bapak bilang cuman 9 orang, bahkan di kampung-kampung di sana orang yang pengen punya apartemen udah bayar DP, udah bayar apa, enggak lanjutkan enggak apa-apa hilang-hilang deh tapi berapa ribu orang yang begitu. Buat saya ini, ini bicara hati nurani, kalau negara tidak hadir di sini akan orang semena-mena menjadi penguasa di republik ini dengan uang yang mereka punya.

Pertama, akses Meikarta itu dibangun saya ingin cerita sedikit Pimpinan karena saya orang sana dan saya hafal betul. Ketika *interchange* batu itu dibangun Meikarta muncul, harga saham Lippo itu Rp100 sampai di



suspend menjadi Rp800 itu awal. Bahkan *gorjoran* promosinya habis-habisan, saya juga lucu dulu apartemen dijual harga studio 285 juta. Saya jujur saja waktu itu menentang Meikarta, karena prosedurnya buat saya kalau berkaitan misalnya perizinan tidak ada persoalan, enggak persoalan, itu sih persoalan kemarin kasus dengan Pemerintah Daerah izinnya itu tidak ada kaitan dengan itu dan tidak ada kaitan dengan persoalan konsumen sebetulnya. Anda dijanjikan, anda bayar, anda punya hak untuk mendapatkan itu, itu yang penting sebetulnya. Kalau misalnya BPKN hanya ngurus 9 orang Pak waduh *unit* yang dijualnya aja luar biasa itu berapa puluh hektar di sana.

Mau saya begini Pak, jangan-jangan gitu karena ini perusahaan besar terus kita tidak bisa berbuat apa pun, negara yang harus mengatur pengusaha Pak, bukan pengusaha yang ngatur negara ini. Saya tidak mau banyak kasus-kasus di republik ini yang mengorbankan rakyat. Rumah saya di sana Pak, sering sekali mereka lapor ke saya, kalau bicara korporatif ada orang yang datang ke sana udah bayar lunas tahun 2017 datang dia bilang mau enggak pindah *unit* harga sekian atau mau dikembalikan belum akad kredit belum apa potong sekian persen, ini apa-apaan. Ngambil duit orang setelah itu dikembalikan, kurangi, *unit*-nya juga enggak tahu, akad juga enggak, loh ini apaan gitu loh. Maka saya minta ke Pimpinan ini jadi rekomendasi kita. Minta BPKN juga untuk menjadi catatan tersendiri, jangan karena ini perusahaan besar terus anda diam, buat apa ada lembaga negara di sini? Saya tidak terima Pak, ini Saudara-Saudara saya, Warga Negara Republik Indonesia yang tidak boleh dizalimi di negaranya sendiri, ini catatan buat kita bersama. Berkali-kali republik ini tidak mampu melindungi rakyatnya saya tidak mau ini terjadi lagi.

Saya berharap ini menjadi catatan Pimpinan menjadi rekomendasi agar ada upaya BPKN untuk kalau bicara gini Pak ini perdamaian lucu, dari perdamaian sendiri Bapak tidak tahu berapa sih pemesan Meikarta itu, kan ada pembagian yang *cash* keras berapa, semua berapa, harusnya mereka ditanyakan, tanyakan kepada apa MSU tadi, supaya apa? Supaya Bapak tugasnya mampu melindungi mereka, memberikan hak-hak kepada mereka. Jangan karena Bapak berbenturan dengan perusahaan besar Bapak juga tidak berdaya apa-apa. Yang kita penting sebetulnya adalah proses keluarnya dari prosedur ketentuan hukum tadi. Oke itu *in kracht*, yang bikin manusia Pak kalau manusianya enggak benar juga enggak benar produknya itu gitu loh. Maka perlu pengawasan dari kita semua termasuk Lembaga DPR dan saya berharap hal ini menjadi catatan-catatan buat kita bersama. Ada solusi, Bapak mungkin tahu hanya sekian ini masih banyak lagi Pak di sana. Bila perlu nanti kita umumkan di sini siapa korban Meikarta adukan semua itu yang penting, agar tidak ada boleh lagi yang disembunyi-semunyikan apalagi 86 dan segala macamlah, kita sudah muak Pak dengan kayak-kayak begini gitu.

Itu saja Pimpinan, ini catatan dari saya mudah-mudahan saya juga tangan saya terbuka. Saya tahu betulah mungkin bahkan saya menduga yaitulah karena Lippo Cikarang itu group besar sehingga orang tidak berdaya gitu loh. Kedua memang ini jangan-jangan ada *grand design* perusahaan ini



dibikin kayak begini karena saham ini kan pernah ketika di *suspend* sampai 800 dijual supaya bisa *buy back* tahu enggak dengan harga murah, jangan-jangan begitu. Ini catatan saja mudah-mudahan ini menjadi catatan dan Pimpinan memahami seperti itu. Mungkin Bapak-Bapak sebagian pahlawan ini jual 100 jadi 800 setelah terjual pengen kuasai lagi sahamnya, kondisikan seperti sekarang seolah-olah perusahaan ini *collapse buy back* harganya hancur lagi Rp150 jual untung tarik untung jadi enggak ada ruginya *tuh* gitu loh. Ini catatan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh,

Saya agak khawatir tadi Pak Daeng ini baru sembuh dari sakit nyerempet maut sebetulnya jadi jaga kesehatan jangan terlalu tegang. Baik Pak Andre silakan.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Baik terima kasih Pak Hekal.

**Pak Sarmuji, Pak Hekal Pimpinan yang saya hormati,
Seluruh Anggota Komisi VI,
Bapak-Bapak dari BPKN dan juga Bapak-Bapak korban Meikarta,**

Ya jadi enggak usah kita sebut asosiasi-asosiasinya Pak tapi Bapak korban penipuan Meikarta, kan begitu ya Pak? Jadi Bapak ini kena 378 sama Meikarta penipuan tanpa kekerasan. Nah Pimpinan saya tidak ingin panjang kali lebar kali tinggi ya kita langsung konkret saja, yang pertama adalah ini oligarki yang menzalimi masyarakat, DPR wajib hadir di sini. Bapak-Bapak saya Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra, Partainya Pak Prabowo, yang memimpin rapat itu Pak Hekal juga dari Gerindra, yang banyak ngomong tadi Pak La Tinro juga dari Gerindra, sebelah saya Pak Husein juga dari Gerindra. Bapak lihat keberpihakan Gerindra jelas Pak ya partainya Pak Prabowo, enggak-enggak ketawa ini fakta Pak ya. Bapak harus lihat di DPR itu, ya Pak Daeng dari PAN, Pak Sarmuji dari Golkar, calon Gubernur Jawa Timur tuh Pak yang tutup-tutup muka itu, nah itu Pak Harris Turino dan Pak Nyoman Parta dari PDI, dan Bu Nevi itu yang pakai jilbab itu dari Sumatera Barat dari PKS Pak.

Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian bahwa kemarin sudah rapat di Komisi III ya? Iya isi keputusannya apa kalau saya boleh tahu?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Intinya mungkin karena kemarin kami dia akan mengawal jalannya persidangan yang dimulai tanggal 24 besok Pak.



F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Oke.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Baru dia mungkin akan mendatangkan pihak yudisial sebagai rapat konsultasi untuk membahas proses terjadinya homologasi ini Pak.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Oke, berarti jam 2 kemarin ya Bapak-Bapak sudah ke Komisi III, saya diinformasikan oleh teman-teman Komisi III Fraksi Gerindra. Siang-siang kami rapat Fraksi bahwa Bapak-Bapak akan hadir jam 2 siang kemarin. Jadi intinya Komisi III sudah berkomitmen. Nah sekarang ini kan PR kita DPR secara institusi nih Pak, ini ada peran Komisi VI ya, Komisi III, dan nanti Komisi XI soal OJK dan perbankan ya kan?

Nah untuk itu Bapak-Bapak saya ingin memastikan ke Bapak-Bapak semua bahwa DPR ini Dewan Perwakilan Rakyat bukan Dewan Perwakilan Oligarki. Jadi Bapak tidak salah mengadukan nasib ke kami ya. Jadi Bapak tidak usah kuatir kita ini bukan Dewan Perwakilan Oligarki ya, kita ini dipilih rakyat ya bertanggung jawab oleh rakyat. Gak tau kalau BPKN kan kena telepon bosnya bisa takut kalau kita enggak ada, apalagi kalau Gerindra bos kita tentu pro rakyat Pak.

Nah jadi Pak Bu sekalian kita konkret saja Pimpinan, ini sudah jelas penzaliman luar biasa ya, ini ada ketidakadilan. Bayangkan saja demo dituntut lagi berapa miliar?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA:

56 miliar

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Kan sakit jiwa. Menurut saya sakit jiwa dan itu mempertontonkan di Republik Indonesia ini oligarki bisa melakukan apa saja. Orang menuntut haknya orang ini diintimidasi ya, ya sakit jiwa, tolong Pak mohon maaf Pak, Presiden Jokowi di demo sering enggak pernah menuntut 56 miliar **...(rekaman tidak jelas)...** di demo dituntut itu. Ini, ini, ini catatan besar ya dan ini perlu kita bongkar dan kita tidak boleh mendiamkan.

Nah BPKN kalau enggak punya nyali ya sudah kita tinggal gitu loh ya, bubarin kalau perlu gitu loh. Ini penting Pak ini kan kita sudah rapat berapa bulan yang lalu, Bapak baru lapor loh soal ginjal-ginjalan ke kami, ya lapor lagi kan belum gitu loh ya. Seharusnya Bapak inisiatif bukan laporan-laporan



itu saja Pak, inisiatif lapor Komisi VI. Tadi katanya mau diperkuat sama undang-undang kan agak ragu juga kita memperkuat Bapak undang-undang kalau Bapak cemen begini gitu loh.

Jadi Pak, Bu, saya mengusulkan satu di Komisi VI segera panggil Meikarta, kita kuliti di sini. Nah ya dan kita minta mereka hadir, jangan hanya Meikarta, perwakilan juga hadir ya supaya nanti bisa ada interaktif ya, ada interaktif itu satu ya. Yang kedua kita bikin rapat gabungan ya melibatkan Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI supaya DPR solid dan sikapnya jelas untuk melawan oligarki ini.

Karena ini Pak sederhana ini barang ini menurut saya, ini kan merasa kuat, merasa kuat ya **diduga** ini ada permainan ya. Bayangkan dia bisa bikin putusan PKPU tapi tidak melibatkan konsumen, kan ini kan dahsyat gawat ini Pak ya. Dugaan saya ini kongkalikong ya permainan di PKPU-nya dan ini Pak Hekal kalau ini di dalam ini bisa membatalkan keputusan PKPU ini ya.

Pak Hekal kita dorong nih rapat gabungan kalau perlu kita dorong untuk membatalkan keputusan PKPU ini. Ya karena apa, karena kan konsumen tidak dilibatkan sama sekali ya, konsumen antah berantah ya tiba-tiba muncul. Ini, ini, ini Pak Hekal ini PR bahwa ada secara telanjang kita melihat ada kekuatan oligarki yang sewenang-wenang, harusnya Bapak sudah terima tahun 2019 betul ya? Sekarang tahun 2023 jadi udah *delay* empat tahun kan? Bahkan disuruh nunggu sampai 2027 itu kan cara mereka *buying time* saja.

Saya lewat Jakarta-Bandung juga belum ada pergerakan apa-apa. Kalau memang 2027 ada itikad baik tentu sudah ada mobilisasi di sana, tapi faktanya kan enggak. Jadi ini proyek sudah bermasalah dari awal Pimpinan, kita tidak boleh DPR ini diam, kita tidak boleh hanya basa basi kepada mereka ya karena ini bentuk kezaliman oligarki kepada rakyat Indonesia ya. Ini, ini, ini kesimpulan saya penzaliman oligarki kepada rakyat Indonesia.

Nah kalau itu kita biarkan enggak ada gunanya namanya Dewan Perwakilan Rakyat ya, enggak ada gunanya Dewan Perwakilan Rakyat. Karena urusan ribuan warga yang terzalimi dan dekat dari Jakarta, ya dapilnya Pak Daeng mana Pak Daeng tadi? Ke toilet, ini dapilnya Pak Daeng, di sini Pak yang dapil Bapak banyak ada Pak Daeng dari PAN, Teh Rieke Pitaloka dari PDI-Perjuangan, siapa lagi? Pak enggak itu Depok. Depok Kota Bekasi Bu, ini Kabupaten Bekasi yang ketangkap Bupati Bekasi.

Jadi, jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tidak usah kuatir Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah jalan yang benar. Saya akan usulkan dua hal kepada Pimpinan dan saya akan dorong sebagai Kapoksi Komisi VI Fraksi Partai Gerindra saya akan dorong kesimpulan rapat hari ini, pertama kita panggil Meikarta dan Bapak hadir di sini dengan BPKN lagi ya. Yang kedua saya mendorong rapat gabungan Komisi VI, Komisi XI, dan Komisi III, supaya kita di DPR ini bisa mengambil keputusan yang komprehensif ya. Jadi kuat dan solid untuk mendukung perjuangan Bapak-Bapak ya. Yang ketiga Pak Bapak tidak usah

kuatir DPR tidak pernah takut sama oligarki, DPR ini adalah wakil rakyat Bapak. Jadi Bapak enggak usah kuatir ya Bapak sudah melapor kepada yang benar. Kami di Komisi VI makanya Pak Sarmuji hadir itu langsung dari Surabaya dia hadir, lalu Pak Hekal juga langsung hadir memimpin rapat ini untuk memastikan bahwa kita akan menindaklanjuti urusan Bapak-Bapak.

Jadi gitu Pak Hekal ini kesimpulan saya keadilan luar biasa, nah itu nah itu Pak Demer *tuh* dari Bali khusus itu hadir itu Pak, itu suara langitnya udah keluar itu, itu dari Bali itu Pak Partai Golkar. Jadi berarti Golkar baru dua Pak Sarmuji sama Pak Demer tapi tetap Gerindra empat Pak. Jadi Bapak harus tahu ada yang bekerja dongengin di medsos ada yang benar-benar kerja hadir gitu loh Pak. Jadi gitu ya Pak, jadi ada tiga hal ya Pak Hekal yang pertama ini bagi saya keadilan luar biasa, oligarki kepada rakyat Indonesia dan wajib DPR mengadvokasi dan melakukan bantuan untuk menyelesaikan ini, yang kedua saya minta kita segera rapat undang segera minggu depan, pekan depan Selasa atau Rabu ya enggak usah ditunggu lama-lama lagi, kita geser agenda-agenda yang lain. Selasa kalau bisa Selasa kita undang Meikarta, Bapak-Bapak hadir, BPKN hadir ya, lalu setelah itu kita lanjut rapat gabungan Komisi VI, Komisi III, dan Komisi XI. Biar ini konkret Pak nanti dalam rapat gabungan itu kita bisa urai masalahnya apa sih kita undanglah Polri, kita bisa undang kalau di Komisi III Polri dan juga pihak bisa Mahkamah Agung, Komisi VI kita bisa undang yang terkait, Komisi XI masalahnya di OJK bagaimana kita hadirkan, jadi rapat itu bisa ngambil keputusan, ya yang konkret yang mengikat bagi seluruh *stakeholder* gitu loh.

Kalau di Komisi kita siapa Menteri yang urusan begini itu? BPKR? Atau Menteri Investasi kali ya? Karena kan dugaannya waktu itu kan Meikarta ini melibatkan investor China ya waktu itu ya. Kan ramai itu pekerjanya dari China waktu itu kan? Itu kan TKA waktu itu kalau saya masih ingat kok. Waktu awal-awal 2017 itu bagaimana yang bekerja di Meikarta itu TKA-TKA dari China kan? Kontraktornya dari China, TKA-nya juga dari China waktu itu bahkan dugaannya waktu itu izin-izin kerjanya juga enggak ada.

F-P.GOLKAR (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Ketua, Ketua izin itu Pak Andre itu masalah itu di BKPM Pak Andre.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Ah kalau gitu, Siap Pak Demer terima kasih Pak Demer.

KETUA RAPAT:

Golkar

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Ini dari Bantul Pak mendukung Bapak.



KETUA RAPAT:

Nyerempet BKPM Golkar ini.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Kalau gitu kita undang Kepala BKPM.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Bukan, kewenangan untuk investasi biasanya itu dimulai oleh BKPM karena ada yang namanya *tax holiday* dan termasuk juga *tax-tax* yang lain yang kalau itu untuk, untuk yang namanya investasi ada kemudahan-kemudahan berinvestasi itu ada di BKPM mungkin, perlu dipertanyakan kepada BKPM.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Nah perlu kita kalau gitu BKPM nanti kita undang. Nah yang baru datang itu Pak Khilmi Gerindra lagi Pak, 5 Gerindra sudah. Nah baru satu partai pendukung Anies Nasdem datang itu Pak di pojok kiri jadi gitu Pak. Jadi baru nih Nasdem datang satu. Jadi gitu ya Pak Hekal, apa ? oh iya monitor di luar jadi gitu. Jadi gitu Pak Hekal, terima kasih Pak Hekal saya minta tiga hal itu kita bisa kita eksekusi supaya kita panjang kali lebar kali tinggi kita harus ada aksi, saya usulkan Selasa kita rapat dengan Meikarta, Rabunya kita segera minta izin Pimpinan DPR kita rapat gabungan. Ya salah satunya mitra Komisi VI selain BPKN kita undang Saudara Bahlil Lahadalia.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhi,

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh,

Baik ada lagi yang ingin menyampaikan?

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Saya Pak.

KETUA RAPAT:

Baik Bu Nevi



KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Terima kasih Pak Hekal, mohon maaf Ibu sebentar.

Saya apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Bang Andre ya Pak Andre, saya di sini Dani Amtori Pak wakil dari Ketua PKPKM. Jadi menanggapi kalimat oligarki mohon maaf sebelumnya kebetulan di tanggal 5 Desember saya sebagai Ketua Panitia Demo untuk aksi unjuk rasa di depan Pak. Kata-kata oligarki itu kami sampaikan dan kata-kata oligarki itu menjadi tuntutan untuk persidangan kami nanti di tanggal 24 Desember.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Nah makanya Pak, supaya untuk melindungi Bapak nanti di dalam rapat ini saya bikin kesimpulannya melawan oligarki Bapak enggak usah khawatir. Saya aja saya kasih tahu Pak, Dirut Meikarta itu teman saya Pak

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Baik Pak.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Enggak ada urusan, ini soal bela rakyat Pak. Pertemanan itu tidak mengganggu urusan bela rakyat. Saya kenal kok teman saya mungkin Pak Hekal juga kenal itu teman Pak Hekal juga ya.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Jika nanti di hari Sabtu

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Enggak dia enggak Gerindra, pertanyaannya kan eh Pak Group Lippo emang pernah dukung Gerindra? Group Lippo kan dekatnya sama siapa kan kita tahu. Jadi kalau bilang Group Lippo dukung siapa kan kita tahu sama tahulah kan itu viral di media sosial Lippo itu dukung siapa. Kan kalau mau buka-bukaan Pak itu loh.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):



Itu sidang perdana kami Pak.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Ya sudah supaya Bapak aman nanti kesimpulan rapat ini dibawa-bawa, loh bukan kami, saya yang bilang kok di foto oligarki, Anggota DPR (rekaman tidak jelas) oligarki, di rapat bawa-bawa itu depan hakim. Kalau perlu Bapak di depan hakim, bahwa DPR saja bilang Meikarta *tuh* oligarki, Bapak bilang itu Pak, enggak usah takut nanti kesimpulan rapat Bapak-Bapak pulang di situ nanti akan ada, Meikarta *tuh* oligarki, Bapak-Bapak melawan oligarki itu modal dari kami Pak.

Terima kasih Pak.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Terima kasih, terima kasih Pak Andre.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Sebentar udah? Bapak ya.

KEPALA BPKN RI (RIZAL HALIM):

Sedikit Pimpinan nambahkan.

Mungkin kalau boleh menyarankan sebelum tadi usulan Pak Andre dilakukan menurut saya, menurut kami yang paling penting adalah berkoordinasi dengan yudikatif, memikirkan mekanisme kalau memang ada kesalahan dalam putusan, hukum acaranya untuk membatalkan putusan ini seperti apa. Nah ini mungkin yang paling penting setelah itu baru dengan Meikarta mereka pasti berkelit dengan putusan. Nah yang paling penting dengan yudikatifnya, ini bagaimana hukum acara yang bisa ditempuh apakah pihak legislatif atau kah pihak korban untuk bisa membatalkan putusan ini. Nah bagi BPKN kami tidak punya kewenangan untuk sampai ke sana, jadi saya, kami mohon maaf sebesar-besarnya tetapi ketika itu di 2018 sebelum putusan itu udah kami selesaikan dengan baik. Itu usulan kami Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik kembali ke Ibu Nevi silakan.

F-PKS (Hj. NEVI ZUAIRINA):

Iya terima kasih Pimpinan dan



**Anggota Dewan Komisi VI yang kami hormati,
BPKN, Pak Rizal bersama dengan kawan-kawan,
Dari Meikarta dari Komunitas,**

Yang pertama tadi mungkin saya juga sudah menyimak, pastikan Pak dari Komunitas Peduli Konsumen Meikarta bahwa pembeli Apartemen Meikarta dipastikan semua itu sudah melapor ke BPKN, artinya jangan sampai nanti ada yang melapor ada yang tidak gitu, ada yang setuju dengan sampai 2027 serah terima ada yang tidak nah ini pastikan selain tadi tahapan-tahapan ini kita sudah setujui gitu. Karena ini menunjukkan kekompakan bahwa buat pembeli Apartemen Meikarta ini memang menolak ya PKPU gitu ya.

Lalu terus yang kedua yaitu kami dari Fraksi PKS tentu meminta agar semua hak-hak para pembeli Apartemen Meikarta yang telah menunaikan kewajibannya bisa segera dipenuhi oleh pihak PT Mahkota Sentosa Utama dan diharapkan BPKN bisa mengawal kepentingan para pembeli Apartemen Meikarta. Mungkin Pak Rizal mungkin tolong sampaikan mungkin kita agak melebar sedikit Pimpinan. Sebenarnya kasus untuk gagal serah terima apartemen unit atau mungkin yang lainnya di negara kita banyak Pak, Pak Rizal ya. Mungkin bisa disampaikan kira-kira regulasi apa yang bisa me, me apa namanya *tuh* me, me menyelamatkan atau mungkin mengamankan para pembeli ya pembeli-pembeli apartemen atau *unit* atau yang lainnya sehingga jangan sampai seperti kejadian ini ke depan lagi ya. Saya dengar ada regulasi yang terbaru yaitu beli unitnya bukan dalam keadaan kosong, karena kan memang kita udah rahasia umum sejak 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu apartemen itu dibangun atau mungkin unit lain selalu *tuh* dibangun oleh atas uang pembeli jadi bukan dari modal para apa namanya investor.

Mungkin itu Pak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

F-P.NASDEM (MUHAMMAD RAPSEL ALI):

Pimpinan sedikit Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Itu istri mantan Gubernur jadi biasanya nih ngeladenin *developer* nakal.

Silakan Pak Rapsel ini mantunya Bapak Wakil Presiden.

F-P.NASDEM (MUHAMMAD RAPSEL ALI):



Siap terima kasih Pimpinan.

Serta rekan-rekan yang saya banggakan,

Saya *to the point* aja ini potensi kerugiannya berapa ini? Supaya kita tagih apakah secara langsung atau secara hukum.

Makasih.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Baik terima kasih Pak Rapsel salam kenal.

Jadi ini kita itu sekarang itu kan tadi telah saya sebutkan bahwa anggota komunitas itu kurang lebih 120 baru ya tapi di luar sana itu udah ribuan Pak konsumen *tuh* sebetulnya. Dari 120 aja itu sekitar kerugian itu 28 miliar Pak eh 31 sekarang, 31 Pak maaf 31 miliar, 31 miliar Pak. Iya yang 120 orang yang ribuan di sana kan. Ya sebagai gambaran ya mohon izin saya menjelaskan bahwa PKPU itu diklaim dari 15.800-an suara ya, konsumen ya?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Kreditur konkuren.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Kreditur konkuren Pak 15.800, kenapa?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Izin Pak kalau untuk konsumen berdasarkan rilis dari James Riady Meikarta terjual 130 ribu unit tahun 2017 itu ada di harian kompas, harga unit paling murah 285 juta benar Pak, benar Pak yang paling mahal sekitar angka 1 miliaran yang berdasarkan ukuran luasnya yang membedakan.

KETUA RAPAT:

Jadi kalau sampai tahun 2022 mungkin udah lebih dari 136 ribu kan? Masih jualan?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Masih jualan.

KETUA RAPAT:

Tuh masih jualan mungkin Pak Khilmi udah nyicil juga itu. Baik ada lagi?

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):



Pimpinan sedikit Pimpinan.

Saya menghimbau kepada perhimpunan korban Meikarta ini, tolong diumumkan juga Pak, rekrut semua sebanyak mungkin Pak biar mereka juga tidak jadi korban karena banyak. Saya lihat kemarin ada Ibu-Ibu di kampung mereka udah bayar itu berapalah DP sekian gitu tapi karena proses sulit-sulit itu ditinggalin aja, hilang aja itu duitnya gitu dan saya yakin betul yang begitu banyak, yang begitu banyak. Mereka kayak nyimpen duit mana enggak punya rumah, simpan duit puluhan juta di situ dan itu saya yakin betul banyak yang begitu dan itu hilang begitu saja. Loh siapa yang menikmati uang itu, gitu loh. Nah ini tolong nanti Bapak-Bapak juga bila perlu ini grup ini dibikin menjadi, di apa disosialisasikanlah supaya kasihan teman-teman yang lain juga punya wadah untuk diakomodir mereka. Apanya ? Pak Bapak itu korban kita lawan Pak bareng-bareng gitu ajalah.

KETUA RAPAT:

Baik cukup?

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Sedikit aja Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Nyoman silakan ini PDIP kurang bersuara nih kali ini, silakan, silakan Pak.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Iya pendekatnya sebenarnya bukan partai ya kalau, saya dari PDI-Perjuangan jadi biar tidak dikira urusan rakyat hanya Gerindra aja yang ngomongin rakyat. Jadi ini statusnya bukan urusan berlomba-lomba ya tapi substansinya, saya dari tadi sudah sampaikan Bapak kok kena tipunya berulang-ulang gitu loh, disetiap tahapan tertipu lagi, setiap tahapan tertipu lagi.

Prinsipnya kami setuju apa yang disampaikan oleh Bung Andre tadi kita harus, harus sikapi harus terlibat DPR, khususnya Komisi VI harus hadir dalam proses ini dan yang seperti ini kan sangat banyak terjadi cuma kebetulan ini jumlahnya besar sekali, iklannya begitu terbuka, dan sangat lama itu di media-media cetak maupun tv.

Dan khusus kepada BPKN sampai hari ini kan masih banyak yang iklan-iklan seperti ini di tv kita. Bapak melakukan proses-proses apa istilahnya *monitoring* atau cegah dini tidak itu? Saya melihat juga di, di tv yang menawarkan apa namanya tempat penginapan atau villa dan lain yang sebagainya yang ada di Bali juga banyak sekali setiap hari ada iklan di tv secara terbuka dijual dengan segmen sekitar jam 9 sampai jam 10 di satu tv



itu dilakukan pencegahan tidak? Sebetulnya hampir sama kok dengan, dengan yang seperti ini, itu satu.

Yang terakhir pertanyaan khusus kepada BPKN Bapak jadi saksi tidak dalam kasus ini ketika ada proses persidangan di Pengadilan yang mengeluarkan keputusan PKPU itu? Jadi Bapak enggak jadi saksi? Tidak dilibatkan dan tidak melibatkan diri. Kan konsumen sudah lapor kan ke, ke,

KEPALA BPKN RI (RIZAL HALIM):

Kalau yang sebelum PKPU itu ada 9 udah selesai.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

9 orang?

KEPALA BPKN RI (RIZAL HALIM):

9 orang yang menurut

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Hanya 9 orang dari 15 ribu yang Bapak urus?

KEPALA BPKN RI (RIZAL HALIM):

Jadi gini Pak, jadi Pak izin Pak ya sekalian bisa jelaskan yang 9 orang itu. Jadi 9 orang ini 5 orang itu menganggap bahwa setiap orang di satu orang punya group 200an. Saya bilang bawa aja grupnya kalau enggak kami ke sana, kami tiga kali ke sana Pak, nyari konsumennya, kami pasang pamflet suruh ke kantor pada tahun 2018-2019 tapi enggak datang-datang Pak. Karena kan kita butuh data kalau ada yang seperti itu datanya berapa, berapa uang yang masuk, di mana dimasukkan, bagaimana bayarnya terus kita akan komunikasikan untuk dikembalikan kalau memang ingin dikembalikan, itu yang kita lakukan pada saat itu.

Nah kalau Bapak ini datang 2022 enggak bisa saya berbuat apa-apa karena putusan, putusan PKPU sudah turun 2020, enggak bisa saya melakukan apa-apa. Yang bisa mungkin nanti kalau ada rapat konsultasi legislatif dengan yudikatif. Saya juga belum tahu bagaimana hukum acaranya untuk membatalkan putusan itu, kalau memang ada pelanggaran terhadap hukum acara dalam putusan PKPU itu. Karena menurut saya kredit konkuren ini kreditur konkuren yang 15 ribu jangan-jangan yang dimaksud adalah perbankan, karena uangnya perbankan yang dipakai kan? Ketika Bapak ini KPA maka yang dipakai itu adalah uang perbankan. Bapak, oh punya info juga sebagian karena ada bank lain juga. Nah Bapak inilah yang membayar ke perbankan. Nah mungkin itu yang dugaan saya.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):



Pak Rizal, izin Pimpinan.

Dari BPKN itu sampai bisa mengakses enggak kira-kira Pak data-data berkaitan yang *cash* keras, kemudian *cash* bertahap, sama KPA? Enggak bisa ya. Kalau perbankannya ada berapa jenis bank tadi saya sempat terlewat tadi di zoom itu.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Izin Pimpinan.

Kalau untuk banknya yang untuk tergabung dalam komunitas kita ini ada Bank Nobu untuk sebagian besar sekitar 70%an itu kreditnya di Bank Nobu, Bank BNI, Cipta Dana, Bank CIMB Niaga, Bank Muamalat, Asiatik

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Yang paling gede Nobu Mas ya?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Nobu masih Nobu.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

70% ya?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Yang *cash* keras dia kalau *cash* karena memakai rekening Bank Nobu.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Enggak kalau KPA kan berarti kan perbankannya yang **...(suara tidak jelas 01.37.46)...** kalau *cash* keras kan berarti langsung ke developer-nya

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Langsung ke MSU-nya ada juga Pak yang

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Cash bertahap.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Cash bertahap tetapi memakai rekening

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Itu juga langsung ke *developer*-nya?



KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Langsung ke *developer* tetapi memakai rekening Bank Nobu untuk transfernya, virtual *account*-nya dikasih

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Dapat enggak data kira-kira yang *cash* yang keras sama *cash* bertahap berapa dari ribuan konsumen yang

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Untuk itu kita kenapa bisa mengklaim yang kreditur konkuren yang 15 ribu waktu kita datang ke Meikarta kita didudukan status kita sebagai kreditur konkuren. Bapak-Bapak adalah kreditur konkuren harus mematuhi isi homologasi. Jadi kita mengambil pemikiran berarti ada 15.800 ini adalah konsumennya, sedangkan dari rilisnya James Riady tahun 2017 *unit* telah terjual 130 ribu *unit*. Berarti 130 ribu *unit* kalau kita ambil satu orang saja mengambil 2 *unit* berarti ada 65 ribu debitur. Nah itu yang kita ambil analisisnya tetapi kan rata-rata mereka mengambil satu-satu *unit* paling banyak dua *unit*. Itu makanya kita bisa tidak mengklaim kita hanya berdasarkan data kita didudukan sebagai kreditur konkuren karena di, di putusan homologasi itu tidak disebutkan mana konsumen, karena memang kita tidak dilibatkan makanya kita bingung seperti yang saya bilang tadi Bapak, Ibu kita ini bingung konsumen komunitas kita ini PKPU itu apa sih, apakah itu sejenis makanan atau sejenis tanaman itu yang kita bingungnya, yang sebagian memang kita buta dengan hukum Bapak.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Oke ada lagi? Sebentar-sebentar ini biar Pak Anggota ini dulu mau menyampaikan, ini dari Jawa Barat juga dia.

F-P.GERINDRA (MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., MBA.):

Terima kasih mungkin tentunya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman bahwa Bapak-Bapak yang hadir di sini adalah korban dan kita sebagai wakil Bapak-Bapak di sini harus terus memberikan dukungan ya. Tapi pada intinya Pak di sini ada BPKN yang di mana BPKN juga merupakan mitra kita di Komisi VI. Saya hanya ingin mengingatkan pada BPKN bahwa salah satu tugas fungsi dari BPKN ini adalah selain menerima aduan tentang perlindungan konsumen fungsinya juga adalah memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan dibidang perlindungan konsumen. Kalau kita lihat Pak dalam apa namanya presentasi yang Bapak bagikan kepada kami di sini ada jumlahnya



8.196 pengaduan ya, di sini juga ada terbagi dari beberapa jenis pengaduan dari mulai perumahan, e-commerce, dan lain sebagainya Pak. Karena di sini ada tugas fungsi Bapak yaitu memberikan saran dan juga rekomendasi kepada Pemerintah dan juga melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang disebutkan tadi sebelumnya oleh pimpinan rapat Pak Hekal ya, ini Bapak saya membutuhkan tentunya kami membutuhkan apa yang bisa menjadi masukan Pak. Bapak harus bisa memberikan masukan juga Pak yang konkret gitu loh Pak. Kalau kata Bang Andre bilang yang konkret seperti apa Pak, supaya jangan sampai ini terjadi lagi hal-hal yang seperti ini.

Karena kalau kita baca di sini ada pengaduan mengenai perumahan ya tahun 2017 99, 2022 156 belum lagi pengaduan-pengaduan yang lain Pak. Jadi Bapak kami menunggu Pak, ini salah satu langkah atau pun solusi konkret yang Bapak harus lakukan. Bapak harus memberikan masukan pada Pemerintah apa yang harus dilakukan jangan sampai ini terjadi lagi dan ini terus menerus merugikan masyarakat Pak, ini harus ada antisipasinya seperti apa Pak. Jangan cuman pada saat ada masalah Bapak ini hanya ya didatangi hanya apa ini dianggap sebagai hal-hal yang biasa selalu terjadi dan tanpa ada solusi atau pun tanpa ada rekomendasi yang betul-betul bisa mem apa memberikan preventiflah Pak harus ada ini Pak perlindungannya seperti apa gitu loh Pak. Jangan, jangan hanya menerima sudah ada apa terjadi baru menerima gitu, preventifnya seperti apa Pak ke depan, karena ini tidak menutup kemungkinan akan ke depan akan ada hal-hal semacam ini lagi Pak.

Sebelumnya mungkin di Komisi VI ini banyak, banyak sekali pengaduan-pengaduan dari mulai yang sekarang masalah Meikarta sebelumnya diawal-awal kita masalah Jiwasraya yang sampai sekarang juga belum selesai ya, terus lalu ada robot trading, dan sekarang mengenai Meikarta Pak.

Jadi BPKN ini juga harus perannya juga harus betul-betul dimaksimalkan Pak, jangan sampai badan-badan yang menjadi mitra dari Komisi VI ini hanya ya nama saja, mendapatkan pengaduan sudah begini, sudah begitu, tapi preventifnya apa hasilnya apa gitu yang bisa diberikan supaya hal-hal ini bisa di apa namanya bisa tidak terjadi kedepannya.

Itu saja Pimpinan dari saya, dari saya.
Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh,

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh,

Baik cukup?



F-P.GOLKAR (DONI AKBAR, S.E.):

Pimpinan sedikit Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oh iya silakan Pak Doni.

F-P.GOLKAR (DONI AKBAR, S.E.):

Enggak saya informatif pengen tanya dengan apa dengan BPKN ini Pak, itu Pak di *slide* Bapak itu ada pengaduan *closed* sebanyak 9 konsumen karena *developer* Apartemen Meikarta sedang dalam proses PKPU. Yang ingin saya tanyakan *tuh* apakah 9 konsumen ini mewakili keseluruhan konsumen itu Pak?

KEPALA BPKN RI (RIZAL HALIM):

Individu.

F-P.GOLKAR (DONI AKBAR, S.E.):

Itu individu artinya, artinya kalau ada konsumen lain yang mau mengajukan bisa enggak? Memungkinkan tidak misalnya seperti itu, itu pertama Pak.

Sesudah itu yang kedua Pak saya tanya, ini ada putusan PKPU Pak, putusan PKPU ini antara PT Mahkota Sentosa Utama dengan PT Graha Mega Tri Tunggal, apakah itu juga mewakili keseluruhan nasabah atau konsumen itu Pak? Kalau menurut saya, saya itu masih belum bisa ngelihat apa, apa secara terang benderang itu apakah proses ini sudah mewakili keseluruhan nasabah yang dirugikan itu yang pertama. Yang kedua, kan banyak Pak Bapak sampaikan tadi mungkin ada sekitar asumsikanlah 65 60 ribulah ya, kenapa tidak banyak gitu Pak maksud saya yang datang seperti Bapak ini, iya, oke, oke kalau itu. Ya sudah oke-oke terima kasih cukup.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Saya sudah, sudah mengirimkan surat sebelumnya, ya jadi karena kami mungkin Bapak sudah terima suratnya? Sudah. Di dalamnya kan ada keluhan kami itu bahwa kami itu diperlakukan ada kesepihakan untuk pembuatan aturan, aturan mengenai P3U-nya Pak itu di antaranya. Jadi kami menunggu terus sehingga ini surat resmi ya karena terus terang kami ini udah berbadan hukum ya, artinya sudah legal ya. Jadi makanya kami menunggu Bapak itu cuma ya enggak ada *feedback* ya kami juga ya sudah gitu, silakan Bu

KETUA RAPAT:



Baik.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (Ir. AEP MULYANA):

Ini ada lagi mungkin tambahannya maaf.

ANGGOTA KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA:

Mohon izin Bapak Pimpinan.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, saya jauh-jauh datang dari Surabaya Pak, iya

KETUA RAPAT:

Calon Gubernur.

ANGGOTA KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA:

Jadi begini Pak

F-P.GOLKAR (M. SARMUJI, S.E., M.Si / WAKIL KETUA):

Ini rumahnya jauh sekali Bu.

ANGGOTA KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA:

Nah itu saya mau cerita Pak, jadi Lippo itu kan punya banyak *mall* ya di kota-kota di Indonesia. Jadi mereka, mereka jualannya enggak di Jakarta aja Pak ada diseluruh Indonesia termasuk di Surabaya ya. Jadi saya itu enggak tahu sih sebenarnya Meikarta itu ada di mana *nginjakin* kaki aja enggak pernah. Jadi saya cuma percaya nama besarnya Lippo karena yang di iklan-iklan semuanya pakai logonya Lippo. Nah ya saya tahunya Lippo itu kan perusahaan besar ya *developer* ya sudahlah, jadi mereka itu sebenarnya kan cuma jualan gambar aja ya brosur-brosur, terus saya juga lihat iklan di tv setiap hari muncul di tv terus sepertinya kok menarik ya jadi saya ambil padahal saya kan enggak ngerti Meikarta itu di mana aja ngerti saya.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Ibu, Ibu korban lihat gara-gara ada pejabat negara datang ada juga enggak?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA:

Saya enggak tahu.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Ooh waktu itu.



KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA:

Ya sudah saya ambil *unit*-nya satu Pak pakai cicilan Nobu, jadi saya beli itu tahun 2017. Ya jadi dari 2017 sampai tahun 2022 itu saya sama sekali tidak pernah tahu yang namanya Meikarta, menginjakan kaki di Meikarta, baru kemarin tanggal 30 November 2022 saya ke Meikarta itu pun dalam rangka untuk nagih *unit* apartemen saya ada di mana. Karena saya selama ini cicilan di Bank Nobu itu tidak pernah terlambat, tidak pernah yang namanya apa namanya kena denda jadi saya ini termasuk orang yang patuh bayar cicilan.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Izin, Izin Pimpinan.
Ibu udah lunas?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA:

Januari tanggal 12, Januari 2023 ini saya cicilan terakhir udah lunas.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Oh jadi Ibu belum pas, jadi gini. Jadi Ibu belum ada kepastian barang ini Ibu terima Ibu tetap bayar cicilan?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA:

Tetap bayar cicilan.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Ibu sebenarnya belum dengar ini bermasalah itu?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA:

Nah itu saya, saya

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Luar biasa Ibu-Ibu.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA:

Saya prinsipnya begini Pak, saya sudah menjalankan kewajiban saya, saya ingin hak saya dipenuhi.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):



Waduh.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA:

Gitu Pak.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Luar biasa ini

F-P.GOLKAR (DONI AKBAR, S.E.):

Bu izin Bu.

Ada enggak Ibu dikirim surat atau pemberitahuan terkait hasil PKPU atas segala macam ini Bu?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA:

Jadi kan saya di Surabaya ya, yang namanya MSU itu punya data saya mulai dari email, mulai dari alamat rumah, mulai dari nomor telepon WA ya kan. Kalau urusan tagih menagih mereka bisa ngirim email, kalau urusan itu *salesnya* nawar-nawarin pindah *unit* relokasi itu bisa ngirim ke WA saya Pak, tapi kenapa kalau urusan dikirim ke email enggak ngirim ke WA padahal saya tahun 2020

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Sekretariat tolong dicatat itu penting ini ya. Jadi kalau urusan nagih, menawarkan, email Ibu dikirim?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA:

Iya betul.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

WA Ibu dikirim?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA:

Betul Pak.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Tapi urusan PKPU Ibu enggak dikirim? Ya oke-oke mantap ini, ini

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA:



Tidak itu saja, saya juga tanya bagaimana perkembangan *unit* saya lewat email rencana anda bagaimana? Oke lah sama terima PKPU mu ya, tapi disitu kan jelas bunyinya bahwa akan dilakukan pembangunan dalam jangka waktu 24 bulan sejak tanggal homologasi tanggal 18 Desember tahun 2020, jawaban mereka, sedang sedang diupayakan. Saya ke sana itu Mas, *ooh* mending tanah mereka posisinya di mana juga enggak *ngerti unit* saya di mana *tower*-nya, di mana saya enggak *ngerti* (rekaman tidak jelas)

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Pimpinan ini menunjukkan memang rakyat Indonesia patuh dan taat kewajiban, yang enggak patuh dan taat kewajiban itu namanya oligarki ya.

KETUA RAPAT:

Jadi begini, kalau datang ke sana kan tanya *unit*-nya dia tinggal nunjuk ke langit gitu kan.

Baik ini Bapak, Ibu ini sudah cukup panjang rapat kita saya ingin menyampaikan beberapa hal, satu saya jujur aja nih BPKN saya cukup kecewa ya untuk kasus sebesar ini kok bisa cuman 9 individu loh yang diuruskan dan itu pun solusinya juga sebetulnya enggak selesai Pak, karena Bapak bilang ada yang ditawarkan relokasi pasti belum dapat, dijual di *secondary market* apa yang mau dijual barangnya belum ada, *refund* apakah benar dibayar lunas atau tidak atau pemotongan berapa ya.

Yang kedua, saya baca di laporan atau ini yang disampaikan oleh Bapak pemaparan tadi enggak ditunjukkan, kedua keluhan terbesar adalah dibidang perumahan gitu kan, artinya ini kelompok-kelompok seperti ini baik dengan *developer* seperti Lippo atau pun yang lainnya pasti banyak. Rasanya itu harus kita tindak dengan membuat sesuatu terobosan baru di BPKN untuk bisa melayani. Sebab kita dengar nih dari dulu keluhannya adalah kita hanya bisa melakukan penyampaian pandangan terhadap lembaga-lembaga Pemerintah dan seterusnya. Sedangkan kan Bapak-Bapak ini tahu kita ini di Komisi VI dari dulu ingin BPKN bisa bertindak lebih konkret gitu kan, nah itu tugas kita yang lain.

Kedua ini untuk teman-teman Meikarta yang disampaikan terakhir itu poin yang sangat penting. Pada saat PKPU itu seluruh orang sekecil apa pun yang punya hak terhadap itu harus ada upaya serius untuk dihubungi ya. Jadi kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ini namanya dicatut sebagai orang yang menyetujui tadi kita dengar 99 sekian persen itu udah jelas bohong. Kita ini di Komisi VI kemarin baru menyelesaikan mengawal bersama PKPU untuk Garuda. Itu Garuda perusahaan yang punya hutang ratusan triliun, yang punya tagihan ratusan juta pun diundang, diselesaikan, ini skemanya untuk yang 250 juta ke bawah seperti ini, untuk yang besar seperti ini tapi enggak boleh ada satu pun yang terlewat. Kalau dia tidak bisa hubungi secara langsung barulah media koran dipakai, media *online* dipakai, gitu kan. Nah

tapi selebihnya upaya serius itu harus ada, kalau tidak ada dan Bapak, Ibu bisa buktikan, itu PKPU bisa dibatalkan ya.

Nah untuk melakukan itu Bapak perlu bantuan hukum, nah kembali lagi kita minta BPKN jangan berhenti ditutup case-nya mohon maaf Pak saya tadi cenderung dengar seakan-akan Bapak-Bapak ini melindungi Meikarta. Bapak-Bapak ini kita tunjuk untuk melindungi konsumen, Badan Perlindungan Konsumen gitu kan. Jadi ini kita mau kasih tugas kepada Bapak, Ibu kita langsung ke kesimpulan aja coba ditayangkan.

Nah saran saya ini Bapak, Ibu ini dikelompok ini tolong diperbesar grupnya, tolong bergabung dengan kelompok-kelompok lain, karena melawan yang besar Bapak, Ibu juga kekuatannya harus besar. Ada yang tidak logis tadi 15 ribu orang, padahal *unit* yang dijual itu ada 136 ribu baru sampai 2017 kecuali Bapak semua masing-masing beli 10 *unit* ya kan? Kan rasanya enggak masuk akal, dari situ aja udah pintu masuk, tapi tolong cari lembaga bantuan hukum kita minta BPKN juga kawal tapi harus ada *lawyer*-nya juga yang memahami Undang-Undang Kepailitan, PKPU, dan seterusnya karena memang itu, itu secara hukumnya kenapa waktu Garuda itu sampai yang kecil-kecil diurus? Mereka khawatir kalau ada yang tidak terundang bisa dibatalkan.

Ya saya bacakan draf kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI dan RDPU Komisi VI DPR RI dengan perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta terkait pembahasan mengenai aspirasi dari konsumen pengembang pembangunan Apartemen Meikarta PT Mahkota Sentosa Utama, Rabu 18 Januari 2023.

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia dan perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta terkait pembahasan mengenai aspirasi dari konsumen pengembang pembangunan Apartemen Meikarta.

Ini saya rasa setuju semua ya?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi VI DPR RI mendorong BPKN untuk melindungi konsumen korban Apartemen Meikarta sebagai wujud hadirnya negara bagi para korban pengembang Apartemen Meikarta.

Bisa dilakukan Bapak Kepala BPKN beserta jajarannya? baik setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)



3. Komisi VI DPRR I mendorong BPKN RI untuk mengawal penyelesaian hak korban penipuan Apartemen Meikarta dengan *stakeholder* terkait khususnya untuk membatalkan putusan yudikatif atas PKPU Meikarta.

Ini bukan ranahnya Bapak tapi kita minta Bapak untuk mengawal aja, jadi kita ada yang bisa kita tanya gitu kan, makanya bunyinya pengawalan, yang melakukan nanti ke yudikatif ada hukumnya mungkin di Komisi III tapi kita minta Bapak ikutin jangan dibilang bahwa ini udah *case closed* tahun 2019. Oke setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi VI DPR RI akan segera mengundang Meikarta.

Betul? oke?

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi VI DPR RI mengusulkan rapat gabungan Komisi VI, Komisi III, Komisi XI beserta bersama mitra-mitranya untuk menyelesaikan masalah korban penipuan Apartemen Meikarta bersama-sama untuk melawan kedzaliman oligarki.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Nah, kesimpulan poin 5 itu bisa Bapak bawa ke pengadilan.

KETUA RAPAT:

Iya oke.

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada BPKN RI untuk, ini enggak perlulah yang nomor 6 hapus aja.

Oke saya rasa cukup untuk tahapan ini Bapak, Ibu.

Ooh boleh silakan diusulkan ya. Ya ini kan sebetulnya tadi yang terkait kedzaliman oligarki ini dan kita minta BPKN untuk kawal. Cukup dululah ini kan nanti kita lihat berkembangnya, ya.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Tapi izin Pak, Selasa kita sidang perdananya Pak.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Jam berapa ke pengadilan?

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

24 Januari jam 10.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Oh iya bisa jam 2 kan bisa.

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Ooh iya siap.

KETUA RAPAT:

Nanti-nanti, nanti kita, kita sesuaikanlah

KOMUNITAS PEDULI KONSUMEN MEIKARTA (DANI):

Siap.

KETUA RAPAT:

Kita komunikasi, jadi saya rasa cukup ya, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih atas nama Pimpinan Komisi VI kepada seluruh Anggota Komisi VI yang telah hadir, kepada Bapak Ketua BPKN beserta anggota-anggota BPKN lainnya dan jajarannya dan juga kepada perkumpulan konsumen Meikarta. Tolong diperkuat perjuangannya dibesarkan anggotanya, dikumpulkan berbagai kelompok ya dan mudah-mudahan ini bisa membawa kesuksesan untuk perjuangan Bapak, Ibu sekalian.

Terima kasih rapat ini saya tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh,

(RAPAT DITUTUP pukul 12.44 WIB)

Jakarta, 18 Januari 2023

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Dewi Resmini, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001

